

e-news letter

NOV II 2019

PKSPARLEMEN

KREKONSTRUKTIF



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Ir. H. A. Junaidi Auly, MM

Ekonomi Melambat Tenaga Kerja Tersendat

H. Ecky Awal Mucharam
Angka Pengangguran
Naik, Pemerintah Harus
Bertanggungjawab

Ekonomi Melambat, Tenaga Kerja Tersendat



Secara umum kondisi ketenaga-kerjaan Indonesia pada Agustus 2019 cenderung menurun dibandingkan Februari 2019. Jumlah pengangguran melonjak mencapai 7,05 juta (Agustus 2019) dari 6,82 juta (Februari 2019).

Ir. H. A. JUNAIDI AULY, MM

Anggota Komisi XI DPR RI



Tekanan terhadap sektor ketenagakerjaan cukup tinggi. Persoalan diawali dari kegagalan mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, sehingga stimulus terhadap ekspansi bisnis juga gagal. Realisasi investasi juga menurun, karena iklim berusaha yang tidak kunjung membaik.

H. ECKY AWAL MUCHARAM

Anggota Komisi XI DPR RI

Apabila ada yang salah paham terhadap judul pernyataan saya di media tersebut, yang tidak sesuai dengan maksud saya yang sebenarnya, saya

Mohon Maaf

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (14/11) - Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini meluruskan judul pemberitaan beberapa media yang tidak tepat menulis subtansi pernyataannya soal Papua dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan RI (Senin, 11 November 2019).

"Tidak ada pernyataan saya minta stop dan mengawasi gerak gerik misionaris agama tertentu. Bahkan tegas saya katakan misi ceramah agama dilindungi dan tidak ada masalah," tegas Jazuli.

Yang benar, lanjut Jazuli, adalah agar diperlakukan sama seluruh pesawat yang masuk ke Papua dalam hal check and clearance termasuk yang mengatasnamakan membawa misionaris. Misionaris di sini

Jazuli Juwaini Bantah Minta Stop dan Awasi Misionaris di Papua

tidak dimaksudkan untuk misi agama tertentu, melainkan misi, kepentingan, dan agama apapun.

Hal ini dimaksudkan agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang berniat membuat kegaduhan di Papua.

"Justri ini untuk melindungi misi-misi yang mulia tersebut dari penyalahgunaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan semata-mata keinginan kuat kami agar Papua dan bumi Papua mendapat kedamaian mengingat Papua acapkali bergejolak dan korbannya adalah rakyat," katanya.

Jazuli prihatin ada beberapa media yang mengutip pernyataannya dengan judul yang tidak sesuai dengan konten yang saya maksud bahkan cenderung provokatif.

"Karena itu apabila ada yang salah paham terhadap judul pernyataan saya di media tersebut, yang tidak sesuai dengan maksud saya yang sebenarnya, saya MOHON MAAF," ungkapnya.

Dirinya tidak bermaksud menyinggung perasaan saudara-saudara dari kaum pemeluk agama atau kelompok manapun, karena kami cinta Papua, cinta warga Papua, dan cinta kedamaian di Papua.

"Selama ini Fraksi PKS terus berjuang untuk keutuhan NKRI dan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan beragam suku dan agama sesuai prinsip Bhinneka Tunggal Ika," pungkas Jazuli



Ketua Fraksi PKS DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza Palestina

Jakarta (15/11) - Israel kembali menggempur Gaza Palestina yang diklaim sebagai serangan balasan roket-roket kelompok militan Jihad Islam. Dikabarkan 32 meninggal di pihak Palestina (16 diantaranya warga sipil termasuk wanita dan anak-anak) sejak serangan Selasa. Bahkan satu keluarga dengan 6 orang anggotanya meninggal dalam serangan Kamis (14/11).

Ketua Fraksi PKS DPR mengecam serangan Israel yang menewaska

n warga sipil Palestina tersebut sebagai tindakan yang biadab untuk sekian ratus kalinya.

"Ini untuk sekian ratus kali Israel tak memperdulikan korban jiwa warga sipil dan dunia tak bisa berbuat apa-apa kecuali mengecam dan prihatin," kata Jazuli geram.

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, dunia tahu dan paham bahwa konflik berkepanjangan antara Palestina-Israel akibat kebijakan pendudukan Israel atas tanah

Palestina.

"Kebijakan ini merupakan satu-satunya bentuk penjajahan di era modern yang masih langgeng akibat standar ganda negara-negara besar sekutu Israel sehingga Israel tak tersentuh hukum internasional," ungkap Jazuli geram.

Bersyukur sikap negara kita Indonesia sangat jelas, berpihak pada kemerdekaan bangsa Palestina. "Ini adalah amanat konstitusi dan utang sejarah Indonesia

yang memelopori solidaritas bangsa-bangsa untuk merdeka melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955," tegas Jazuli.

Jazuli berharap dunia tidak lagi menutup mata atas tragedi kemanusiaan terbesar dan terlama sepanjang sejarah modern ini. Bersyukur gelombang protes atas pendudukan Israel mulai merebak di masyarakat dunia bahkan di negara-negara barat.

"Kita mengetuk

kesadaran dunia agar segala bentuk penajahan dan tragedi kemanusiaan ini dapat dihentikan dengan cara dan sumberdaya sebesar apapun karena ini adalah tanggung jawab kemanusiaan kita sebagai warga dunia," pungkask Jazuli

”

Kita mengetuk kesadaran dunia agar segala bentuk penajahan dan tragedi kemanusiaan ini dapat dihentikan dengan cara dan sumberdaya sebesar apapun karena ini adalah tanggung jawab kemanusiaan kita sebagai warga dunia

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

Dengan persenjataan yang sangat tidak seimbang, jika serangan Isreal terus berlangsung maka yang akan terjadi adalah pemusnahan Palestina. Dunia Internasional harus menekan Isreal untuk menghentikan serangan dan melaksanakan gencatan senjata yang telah disepakati,

Dr. H. SUKAMTA

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (16/11) — Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta, mengancam keras serangan Isreal yang kembali dilakukan ke kawasan Gaza Palestina pada Jumat pagi 15 November 2019.

Menurut Sukamta serangan ini dikhawatirkan akan semakin menambah korban warga sipil dan kerusakan sejumlah bangunan. Sebelumnya serangan yang dilakukan Isreal 2 hari berturut-turut (Selasa - Rabu, 12-13

KOMISI I

Fraksi.pks.id | Sabtu 16 November 2019

Fraksi PKS DPR RI | @fraksipksdprri | @fpxksdprri | fraksi.pks.id



Kecam Serangan Isreal, Perlu Langkah Nyata Untuk Palestina

November 2019) dilaporkan oleh pihak Otoritas Palestina telah melukai 109 orang dan menewaskan 34 orang yang sebagiannya adalah warga sipil dan anak-anak.

"Dunia Internasional harus menekan Isreal untuk menghentikan serangan dan melaksanakan gencatan senjata yang telah disepakati, pun beberapa pihak di Palestina perlu menahan diri untuk tidak melakukan serangan balasan. Keselamatan warga sipil di Gaza perlu menjadi prioritas. Dengan persenjataan yang sangat tidak seimbang, jika serangan Isreal terus berlangsung maka yang akan terjadi adalah pemusnahan Palestina" jelas Sukamta.

Oleh sebab Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini berharap Indonesia yang saat ini menjadi anggota tidak tetap DK PBB dapat berperan secara maksimal untuk mendorong upaya pemulihan keamanan secara lebih permanen dengan mengupayakan menyelesaikan 2 persoalan utama di wilayah Palestina.

Persoalan pertama menurut Sukamta adalah

ketidakadilan yang dialami oleh warga Palestina dengan minimnya akses air yang sebagian besar dikuasai Isreal, terbatasnya akses listrik, sempitnya mobilitas warga, serta minimnya sarana prasarana umum.

"Problem ketidakadilan ini jika tidak diatasi akan terus memicu panasnya situasi di perbatasan Isreal - Palestina yang dibatasi oleh tembok pemisah. Indonesia melalui forum internasional perlu menggalang upaya nyata pembangunan di Palestina secara berkelanjutan"

Problem kedua adalah masih adanya perpecahan antar faksi dan kelompok di Palestina.

Persoalan ini tentu akan menyulitkan upaya mewujudkan kemerdekaan Palestina yang membutuhkan kekompakan seluruh pihak di Palestina dan juga dukungan dunia internasional. Dalam hal ini Sukamta berharap

pemerintah Indonesia dapat mengambil inisiatif mendorong upaya rekonsiliasi berbagai faksi di Palestina.

"Posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB dan juga negara berpenduduk muslim terbesar di dunia sangat strategis untuk melakukan upaya mediasi dan rekonsiliasi

Palestina, ini penting untuk membuka

babak baru mewujudkan kemerdekaan yang telah lama dicita-citakan rakyat Palestina", pungkask Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini.

Foto : Gilang



Penerapan e-rekap atau e-voting baik untuk memotong cost pemilu yang mahal selama ini, sehingga layak dipertimbangkan untuk kita terapkan di Indonesia, namun harus benar-benar dipastikan keamanannya

Dr. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (14/11) — Mardani Ali Sera, Legislator Fraksi PKS mempertanyakan pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang mengusulkan Pilkada melalui DPRD berdasarkan kajiannya terhadap evaluasi Pilkada langsung selama ini.

"Ini agak aneh menurut saya. Seharusnya para menteri yang baru sebulan dilantik menjabat di periode ke II kepemimpinan Presiden Jokowi harus menyampaikan informasi yang sesuai dengan keinginan Presiden, bukan malah membuat kegaduhan seperti ini, mengembalikan Pilkada

EVALUASI PILKADA LANGSUNG

PKS: Pilkada Langsung Wujud Kedaulatan Rakyat

melalui DPRD seperti di era Orde Baru lalu," kata Mardani, Selasa (12/11).

Ketua DPP PKS ini mengatakan bahwa Pilkada langsung merupakan wujud dari kedaulatan rakyat.

"Justru akan semakin banyak mudaratnya bila mengembalikan Pilkada melalui DPRD antara lain seperti kepala daerah terpilih akan rentan dan mudah diturunkan DPRD selain itu apakah index korupsi akan lebih baik belum tentu juga. Oleh karena itu, evaluasi Pilkada langsung seharusnya concern pada evaluasi teknis penyelenggaraannya," ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua BKSAP DPR ini juga mengatakan bahwa terpilihnya kepala daerah sejak era Pilkada langsung menjadi lebih baik karena bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung.

"Saya juga mengimbau kepada Pak Tito, masih banyak Kepala Daerah yang berprestasi yang lahir dari rahim Pilkada langsung, Bupati Bayuwangi Abdullah Azwar Anas, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan lain sebagainya,"

kata Mardani.

Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur ini mengatakan sudah betul kita harus segera melakukan evaluasi terhadap Pilkada langsung dengan sistem jadi lebih baik.

"Ada beberapa masukan Saya, antara lain perlu diturunkannya Treshold dari 20% mejadi 7 - 10 % agar terjadi kompetisi yang ketat dan menghasilkan semakin banyaknya pilihan calon kepala daerah bagi masyarakat sehingga mereka bisa memilih yang terbaik untuk memimpin nantinya," ujarnya.

Selain itu, Mardani juga mengusulkan sebaiknya Indonesia mulai menerapkan teknologi pada penyelenggaraan Pemilu.

"Penerapan e-rekap atau e-voting baik untuk memotong cost pemilu yang mahal selama ini, sehingga layak dipertimbangkan untuk kita terapkan di Indonesia, namun harus benar-benar dipastikan keamanannya," pungkasnya.

Foto : dpr.go.id



Penggunaan Diksi Radikalisasi Harus di koreksi

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Bapak Drs. H. Adang Daradjatun turut hadir dalam agenda Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang dilaksanakan pada hari Senin, 11 November 2019 di Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

Dalam agenda pembahasan rencana strategis BNPT, pak Adang menyampaikan bahwa mesti ada koreksi dari penggunaan diksi Radikalisasi yang kerap digunakan BNPT. Karena hal ini tentu dapat menjadi stigma negatif terhadap agama dan ini dampaknya tentu tidak baik. Kemudian pak Adang juga menanyakan bagaimana strategi dan langkah konkrit yang dapat dilakukan BNPT untuk mencegah adanya upaya perekrutan anggota organisasi teroris berbahaya melalui jejaring media sosial.

Rekomendasi telah diberikan ke pada BNPT oleh setiap perwakilan fraksi di DPR RI pada rapat ini, diharapkan kedepannya BNPT dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan juga dapat menjaga agar tidak ada kegaduhan lagi di kemudian hari terkait hubungan antara agama dan aksi terorisme, karena jelas hal ini tidak ada sangkut pautnya.



Kebakaran Meluas, FPKS Usulkan Bentuk Panja Kebakaran Hutan dan Lahan

Karhutla ini perlu diperjelas, dari tahun ke tahun kasus kebakaran hutan dan lahan terus terjadi dan cenderung lebih luas kawasan yang terbakar. Ini disengaja atau gimana?

drh. H SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (14/11) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah Indonesia serius dalam menanggulangi kebakaran hutan dan Lahan. Oleh sebab itu, FPKS mengusulkan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) kebakaran hutan dan lahan.

“Kami dari FPKS memandang kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan persoalan serius yang harus diselesaikan. Oleh sebab itu, diperlukan pembentukan Panitia Kerja (panja) karhutla untuk memastikan permasalahan karhutla ini lebih jelas dan transparan sehingga karhutla ini tidak menjadi alasan saling

curiga di masyarakat. Dan yang paling penting adalah dikemudian hari tidak terjadi pengulangan tragedi Karhutla yang terlihat seperti bencana nasional,” ujar Ketua Kelompok Komisi IV – FPKS DPR RI.

Legislator asal Sukabumi ini mengatakan, bahwa dibentuknya panja kebakaran hutan dan lahan bertujuan untuk mengawasi dan meneliti lebih detail penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Oleh karena itu, lanjut dia, adanya pembentukan panja DPR RI dapat mengetahui penyebab utama kebakaran hutan dan lahan tersebut.

“Karhutla ini perlu diperjelas, dari tahun ke tahun kasus kebakaran hutan dan lahan terus terjadi dan cenderung lebih luas kawasan yang terbakar. Ini disengaja atau gimana?”, tanyanya.

Slamet mengatakan, banyak pihak berharap isu

kebakaran hutan dan lahan tidak terulang di masa yang datang. Dengan dibentuknya panja kebakaran hutan dan lahan, akan ada harapan kebakaran hutan dan lahan tidak terulang di masa yang akan datang. Panja ini akan dipandang sebagai upaya penyelesaian masalah yang dilakukan secara serius untuk bangsa dan negara tercinta ini.

Politisi PKS ini menguraikan, berdasarkan rapat dengar pendapat dengan sektion Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, komisi IV meminta kementerian ini ditingkatkan keseriusannya pada upaya pemberantasan kegiatan pembakaran hutan dan lahan. Seluruh anggota komisi IV bersepakat, lanjut dia, bahwa pelaku pembakaran hutan dan lahan merupakan pelaku kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Bentuk dari keseriusan dari pemerintah, menurut dia adalah adanya program untuk menyelamatkan hutan kita.

“Pelaku pembakaran hutan dan lahan ini harus dikenakan pasal berlapis. Ini diperlukan karena perusahaan hutan bertentangan dengan

UU no. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU no. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Serta UU no. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Oleh sebab itu, komisi IV meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pengawasan terhadap seluruh proses

penegakan

hukum dan mengkomodir usulan pembentukan panja ini”, pungkas Slamet..



Kebakaran Meluas, Fraksi PKS Usul Bentuk Panja Karhutla

fraksi.pks.id | Kamis 14 November 2019 | Image Istimewa



Ini disengaja atau gimana?

*Persoalan karhutla ini perlu diperjelas,
dari tahun ke tahun kasus kebakaran
hutan dan lahan terus terjadi dan
cenderung lebih luas kawasan
yang terbakar*

drh. H SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI



Karhutla Riau Parah, Akibat Semua Pihak Abai

Tahun 2020, Jangan sampai ada lagi kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar yang sulit di-kendalikan manusia. Harus ada langkah-langkah preventif dari seluruh elemen stakeholder untuk bahu-membahu mengantisipasi terjadinya karhutla, sehingga ada perbaikan pada antisipasi kejadiannya

Drs. HAMID NOOR YASIN, MM

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta, (12/11) – Seusai kunjungan spesifik ke lokasi kebakaran hutan di Riau, Anggota DPR RI Komisi IV, Hamid Noor Yasin mengatakan, perlu upaya serius pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia.

Dilihat dari dampak yang terjadi, kata Hamid, mulai dari rusaknya kesehatan manusia secara masal, satwa yang turut menderita, hingga tumbuh-tumbuhan di ekosistem terdampak menjadi rusak, sulit untuk dikembalikan.

“Kebakaran di Riau tampak paling parah di seluruh Indonesia. Bahkan menjadi

penyebab protes dari negara tetangga singapore dan malaysia akibat kabut asap yang terbawa ke wilayah mereka. Per Oktober 2019, luasan area terbakar di Riau sebesar 9.094 Hektare. Kecedepannya perlu upaya pembiayaan pencegahan dari pada mengatasi kejadian kebakaran. Ini pertaruhan integritas pemerintah karena kebakaran hutan ini seperti acara ritual yang mesti dihentikan”, ucap Hamid.

Politisi PKS ini sangat prihatin atas kejadian kebakaran hutan yang terus menerus terjadi setiap tahun,

baik area kecil maupun besar. Dan tahun 2019 ini memang sangat besar sehingga menimbulkan dampak negatif yang sangat parah.

“Khusus daerah riau saja, kejadian kebakaran merata di wilayah tersebut. Dari 9.094 hektare karhutla di Riau, sebarannya terinci di tiap daerah, Rokan Hulu 89 hektare, Rokan Hilir 1.941 hektare, Dumai 351 hektare, Bengkalis 1.911 hektare, Meranti 368 hektare, Siak 872 hektare, Pekanbaru 320 hektare, Kampar 368 hektare, Pelalawan 554 hektare, Indragiri Hulu 1.222 hektare, Indragiri Hilir 1.074 hektare, dan Kuantan Singingi 20 hektare”, tutur Hamid.

Hamid mengatakan, perlu gerakan simpati kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan yang mesti terus dilakukan hingga sekarang, karena meskipun kebakarannya sudah mulai mereda akibat musim penghujan tiba, tapi kesengsaraan efek pasca kebakaran masih terasa kepada warga mulai terutama masalah kesehatannya.

“Pengembalian ekosistem yang rusak mulai dari satwa dan flora nya juga menjadi

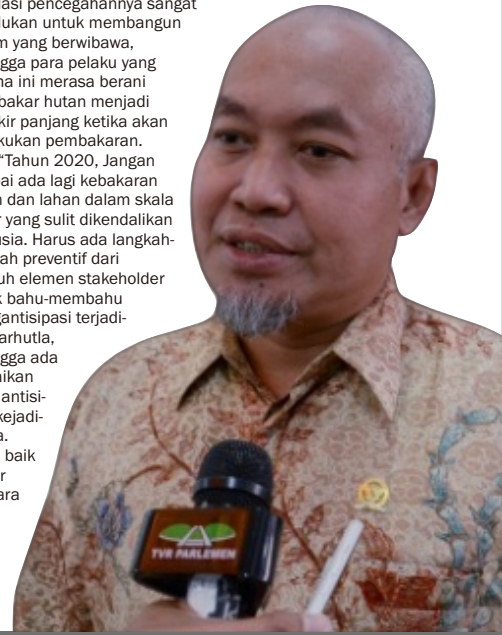
pekerjaan yang berat untuk diselesaikan”, tegasnya.

Legislator dari Jawa Tengah ini mengatakan, negara perlu keras pada penegakan supremasi hukum kepada para pembakar hutan. Regulasi pencegahannya sangat diperlukan untuk membangun sistem yang berbibawa, sehingga para pelaku yang selama ini merasa berani membakar hutan menjadi berpikir panjang ketika akan melakukan pembakaran.

“Tahun 2020, Jangan sampai ada lagi kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar yang sulit dikendalikan manusia. Harus ada langkah-langkah preventif dari seluruh elemen stakeholder untuk bahu-membahu mengantisipasi terjadinya karhutla, sehingga ada perbaikan pada antisipasi kejadiannya. Lebih baik keluar anggara

n pencegahan yang tidak besar dari pada mengatasi kejadian kebakaran yang pasti sangat besar kerugiannya”, ungkap Hamid Noor Yasin.

Foto : dpr.go.id



tim utama
kementerian harus
bersih dari kasus
hukum sehingga
sdm utama
kementerian adalah
orang-orang yang
selain memiliki
kemampuan bagus
juga memiliki
integritas moral
yang baik.

H. JOHAN ROSIHAN, ST.

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta, (12/11) — Anggota DPR RI Komisi IV, Johan Rosihan menyarankan Menteri Kelautan dan Perikanan agar tidak memilih team utama di kementeriannya mulai dari eselon I dan II terjerat kasus hukum.

Menurut Johan tim utama kementerian harus bersih dari kasus hukum sehingga sdm utama kementerian adalah orang-orang yang selain memiliki kemampuan bagus juga memiliki integritas moral yang baik.

"merujuk pada beberapa kasus yang menimpa kementerian kelautan dan

Menteri KKP Disarankan Tidak Pilih Dirjen Bermasalah

perikanan dua tahun terakhir yang melibatkan dirjen dan seken akibat penyimpangan program strategis KKP yang bertujuan untuk meningkatkan produksi sektor budidaya lepas pantai dengan metode KJA (Keramba Jaring Apung) dimana program ini diadopsi dari teknologi budidaya Norwegia", ujarnya.

Kata Johan, target utama dari program KKP ini sangat bagus yakni meningkatkan produksi ikan kakap putih (Lates calcalifer) yang hingga saat ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi.

"Saya menghimbau menteri KKP tidak memilih lagi dirjen yang bermasalah, seperti yang tersangkut kasus korupsi baik saksi yang pernah diperiksa maupun yang sudah tersangka. Proyek besar di Sabang dari tahun 2017 pada lingkungan KKP banyak melibatkan pejabat tinggi di kementerian itu. Sudah saatnya pak menteri melakukan pembersihan agar tokoh utama penggerak kementerian ini diisi oleh orang-orang yang memiliki

integritas moral yang tinggi" himbau Johan.

Politisi PKS ini juga meminta kepada Menteri Edhi Prabowo, agar mengendorse Menteri BUMN supaya memilih komisaris dan direksi BUMN yang bersinggungan dengan KKP seperti Perindo dan Perinus agar dijabat oleh orang-orang yang bersih juga. Ini sudah sesuai dengan slogan menteri BUMN yang akan melakukan bersih-bersih di lingkungan kerjanya.

"Saya mengingatkan kepada menteri KKP, 5 tahun periode menteri sebelumnya, dua kali KKP hasil pemeriksaan BPK adalah disclaimer yakni tahun 2016 dan 2017. Sudah serapan anggaran terkecil APBN di antara mitra kementerian komisi IV, tapi pengelolannya institusinya paling buruk. Ini yang mengakibatkan tahun ini anggaran APBN kementerian mitra komisi IV, KKP paling kecil

dibanding Kementan dan KLHK. Semoga dengan SDM yang baik mendampingi pak menteri, kedepannya citra KKP secara substansi akan ikut menjadi baik", tutup Johan Rosihan.



Bantu Nelayan, Kembalikan Anggaran KKP Jadi 11 Triliun Tahun 2021

Dengan besaran APBN untuk KKP sebesar itu, maka pemerintah diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan di kalangan nelayan dan penduduk pesisir, mampu memajukan sektor maritim dengan teknologi modern, pengelolaan sumber daya laut yang ramah lingkungan hingga membebaskan negara dari jeratan Impor garam”

Dr. ANDI AKMAL PASLUDDIN, SP, MM

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (13/11) — Anggota DPR RI Komisi IV Andi Akmal Pasluddin meminta Pemerintah melalui Menteri KKP, agar anggaran kementeriaannya dikembalikan menjadi 11 triliun pada tahun 2021.

Menurut Akmal anggaran ini untuk saat ini lebih ideal untuk program langsung ke masyarakat berupa bantuan kepada nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam seperti halnya di Kementerian pertanian yang anggarannya langsung menyentuh masyarakat.

Politisi PKS ini menambahkan saat ini anggaran KKP adalah terkecil diantara mitra Kementerian Komisi IV DPR. Tahun 2020. Komisi IV DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Pertanian atau Kementan pada RAPBN 2020 sebesar Rp 21 triliun. Pagu RAPBN KLHK Tahun 2020 sebesar 9,3 Triliun rupiah. Dan pagu anggaran KKP tahun 2020 sebesar Rp6,47 triliun.

“KKP ini jaman pemerintahan SBY selalu mendapat porsi anggaran

terkecil diantara kementerian mitra Komisi IV. Pada awal pemerintahan Jokowi, KKP langsung mendapat lonjakan anggaran signifikan yang semestinya mampu di gunakan untuk memajukan sektor maritim dan pembebasan impor garam dan ikan. Namun pada kenyataannya, dipenghujung periode kepemimpinan 5 tahun pertama Jokowi, KKP kembali ke selera asal yang hanya mampu mengelola anggaran sebesar 6,47 T”, ungkap Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, bahwa anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengalami penurunan yang drastis. Ketika tahun 2016, RAPBN KKP sempat memiliki pagu sebesar 15,8 T meskipun daftar Isian Penggunaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun anggaran 2016 diputuskan sebesar Rp 13,8 T. Namun pada perubahan APBN dalam RAPBNP 2016, alokasi final tahun itu sebesar Rp 11,16 triliun. Menurut Akmal angka 11 T ini merupakan angka ideal untuk KKP.

“Saya berharap, KKP mampu mengembalikan anggaran 2021 yang akan di

bahas tahun 2020 sebesar 11 triliun. Dengan besaran APBN untuk KKP sebesar itu, maka pemerintah diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan di kalangan nelayan dan penduduk pesisir, mampu memajukan sektor maritim dengan teknologi modern, pengelolaan sumber daya laut yang ramah lingkungan hingga membebaskan negara dari jeratan Impor garam”, tutup Andi Akmal Pasluddin.

Foto :
dpr.go.id



Evaluasi Pembangunan Jalan Tol Untuk Keadilan Substantif

Jalan tol dapat dijadikan sebuah gambaran salah satu indikasi ketidakadilan pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini taat membayar pajak namun tidak mendapatkan pelayanan sarana prasarana jalan yang baik.

H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., MA.

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (12/11) — Jalan Tol dan Non Tol menurut anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat sebagai ketimpangan sosial, karena terjadi ketidakadilan.

Masyarakat lanjut Syahrul, saat ini diwajibkan membayar pajak namun tidak menerima hasil yang sebanding untuk menikmati jalan-jalan yang mulus.

Politisi PKS ini mengatakan, pada evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur 2015-2019 Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat masih menjadikan pembangunan tol sebagai primadona dalam renstra konektivitas. Dalam catatan evaluasi target renstra

1.000 KM namun capaiannya menjadi 1500 KM. Kemudian pada renstra dan program kerja 2020 – 2024 dikebut menjadi 2500KM.

“Pemerintah harus mengedepankan prinsip keadilan sosial dalam pemerataan pembangunan. Jalan tol dapat dijadikan sebuah gambaran salah satu indikasi ketidakadilan pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini taat membayar pajak namun tidak mendapatkan pelayanan sarana prasarana jalan yang baik. Sehingga terkesan masyarakat dipaksa untuk melewati tol dan menambah beban kehidupan” jelasnya.

Legislator Muda asal Riau II ini mengingatkan pemerintah, agar memperhatikan jalan-jalan nasional dan provinsi/kabupaten untuk dibangun dan direvitalisasi secara maksimal. Karena kelancaran logistik tidak hanya terletak pada kelancaran dari jalan tol, namun dilihat juga dari sisi pemerataan pembangunan berbasis dampak sosial (social impact). “Pemerintah saat ini

memiliki tantangan besar berupa mengkombinasikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung daya saing nasional. Tantangan ini diantaranya mengefisienkan biaya logistik pada ekspor produk melalui infrastruktur yang baik. Namun disisi lain infrastruktur tersebut harus bisa menjawai keberpihakan terhadap rakyat dan membuat rakyat bisa berekspresi dengan lega untuk meningkatkan perekonomian mereka,” tambahnya.

Politisi PKS ini menyinggung daerah pilihannya di Riau II yang masih banyak desa tertinggal yang harus di benahi jalannya sebagai penghubung

dan penggerak perekonomian di daerah tersebut.

“Pemerintah harus pahami, terutama dalam pembangunan jalan untuk mempermudah arus barang dan menjadikan barang tersebut murah dan tidak mahal. Dengan pembangunan Tol sebagai primadona pemerintah Jokowi jilid 2, akan menimbulkan stigma bahwa pemerintah tidak pro rakyat dan menambah beban masyarakat terutama di pedesaan yang masih tertinggal dan tidak terhubung antara satu desa dengan desa lainnya. Di daerah pemilihan saya Dapil Riau II masih ada satu desa di Kabupaten Kampar termasuk desa tertinggal dan tidak terhubung dengan desa lainnya. Butuh sampan untuk menyeberangi erangi dan

menjangkau tempat tersebut dan ini perlu perhatian pemerintah pusat untuk membuat jalan penghubung,” tutup Syahrul.



Bahaya Percepatan Infrastruktur Jika Tak Diikuti Ketersediaan SDM

Dari lima penyebab ini, yang paling menjadi sorotan adalah tentang metode pelaksanaan konstruksi di lapangan. Padahal, kelancaran pelaksanaan proyek konstruksi di lapangan akan selalu menitikberatkan aspek K3. Program inilah yang dapat menjamin dan melindungi keselamatan dari para pekerja

Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (14/11) — Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sositomoto menilai percepatan infrastruktur tanpa dibarengi dengan ketersediaan SDM profesional akan berbahaya dan memicu kecelakaan kerja.

Hal itu disampaikan Sigit berkenaan dengan rencana pemerintahan yang akan terus menggenjot pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama.

"Anggaran infrastruktur 2019-2024 akan menjadi Rp 6.455 triliun. Kenaikan anggaran ini tentu akan berdampak pada peningkatan pekerjaan infrastruktur yang

akan di kerjakan. Tapi, jika percepatan pembangunan infrastruktur tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga insinyur, maka akan berbahaya. Khususnya untuk keselamatan kerja dan keberlangsungan pembangunan", kata Sigit.

Seperti diketahui, jarak antara kebutuhan tenaga insinyur dan ketersediaannya masih lebar. Berdasarkan data Kemenristekdikti, jika diakumulasi kebutuhan insinyur infrastruktur 2019-2044 mencapai 671 ribu. Sementara SDM yang tersedia hanya 141 ribu sehingga ada kekurangan

sebanyak 530 ribu insinyur infrastruktur.

Sigit menambahkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat, tahun 2017 bidang Konstruksi dan Infrastruktur hanya terdapat 150 ribu tenaga ahli tersertifikasi pada semua level, baik pengawas, perencana, dan juga pelaksana proyek. Padahal, secara ideal, tenaga ahli yang mendapat sertifikasi K3 sekitar 500 hingga 750 ribu orang.

"Berdasarkan hasil evaluasi Komite Keselamatan Kerja (K2) persoalan SDM sebagai penyebab utama kecelakaan kerja disektor konstruksi. Hal ini terbukti dari maraknya kejadian kecelakaan kerja infrastruktur selama tahun 2017-2019", tuturnya.

Seperti diketahui, jelas Sigit bidang konstruksi masih menjadi peringkat pertama pekerjaan yang paling berbahaya dan juga menjadi penyumbang tingginya kecelakaan kerja, tidak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia.

"Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan terdapat lima

penyebab utama yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja.

Diantaranya adalah Kelalaian manusia atau human error, yang mana hal ini disebabkan karena minimnya pekerja yang mendapatkan sertifikasi K3, Penggunaan material konstruksi yang belum memenuhi standar mutu, Peralatan konstruksi yang digunakan belum tersertifikasi, Metode pelaksanaan konstruksi pada lapangan belum memadai terutama pada aspek K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja", jelas Sigit.

Dari lima penyebab ini,

Menurut Sigit, yang paling menjadi sorotan adalah tentang metode pelaksanaan konstruksi di lapangan. Padahal, kelancaran pelaksanaan proyek konstruksi di lapangan akan selalu menitikberatkan aspek K3. Program inilah yang dapat menjamin dan melindungi keselamatan dari para pekerja.

Foto : Gilang



DICALONKAN PERKUAT BUMN, PKS Pertanyakan Status Ahok di Partai Politik

Kami hanya berkeinginan pak menteri BUMN sebagai pemegang saham BUMN yang punya otoritas untuk menentukan direksi dan juga komisaris BUMN memegang teguh prinsip-prinsip GCG, tata kelola perusahaan yang baik untuk semuanya. Semua BUMN. Apalagi BUMN-BUMN yang strategis

AMIN, Ak., MM

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (14/11) — Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menanggapi kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan menempati posisi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Amin Menjadi Komisaris atau Direksi di sebuah BUMN itu ada aturannya. Menurut dia, kalau aturan diikuti, siapa pun berhak untuk menempati posisi tersebut.

Anggota Fraksi PKS itu

mengatakan, status Ahok sebagai anggota dalam partai politik bertentangan dengan aturan terkait pemilihan komisaris atau direksi BUMN.

Menurut dia, aturan tersebut dibuat untuk menjaga agar tidak ada konflik kepentingan di dalam BUMN.

"Ada aturan yang nanti menjaga BUMN tersebut betul-betul untuk kepentingan bangsa, rakyat, dan negara," kata dia.

Tapi Ahok diketahui merupakan kader PDI-

Perjuangan dan sudah jadi anggota partai politik tersebut. Oleh karena itu, Amin mempertanyakan kepatutan seorang anggota parpol tertentu menjabat jabatan di BUMN.

"Kalo orang menjadi kader apalagi pengurus parpol gak boleh menjadi direksi atau komisaris BUMN. Ada aturannya karena nanti bisa menimbulkan conflict of interest," tambah Amin.

Amin juga meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir untuk

memilih jajaran komisaris dan direksi di BUMN dengan mendasarkan pada integritas dan kapabilitas seseorang.

"Kami hanya berkeinginan pak menteri BUMN sebagai

pemegang saham BUMN yg punya otoritas untuk menentukan direksi dan juga komisaris BUMN memegang teguh prinsip-prinsip GCG, tata kelola perusahaan yg baik untuk semuanya. Semua BUMN. Apalagi BUMN2 yg strategis. ." kata Amin.

Komisi VI DPR RI

merupakan satu dari 11

(sebelas) Komisi yang ada di DPR RI yang berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 November 2014 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang perindustrian, perdagangan, standarisasi nasional, investasi, BUMN, serta Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).



“Segala perhitungan harus dilakukan dengan tepat, mulai dari proyeksi perusahaan, manajemen pengelolaan, mitigasi resiko, sampai pada perkembangan industri petrokimia secara global

H. ROFIK HANANTO, SE.

Anggota DPR RI Dapil Jateng VII

Jakarta (15/11) — Pemerintah berencana menjadikan PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang saat ini 96% sahamnya dimiliki oleh pemerintah untuk masuk ke dalam daftar perusahaan pelat merah yang mandiri.

Melalui PP 66/2019, pemerintah telah mengkonversi utang PT. Tuban Petrochemical Industries (TPI), sebagai induk PT. TPPI, kepada pemerintah sebesar Rp. 2,62 Triliun menjadi 157,91 ribu lembar saham milik pemerintah. Pemerintah berharap, upaya ini dapat menimbulkan potensi besar dalam pengembangan industri petrokimia nasional.

Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah VII Fraksi PKS Rofik Hananto mengapresiasi upaya pemerintah tersebut. Dia melihat upaya penguasaan saham PT. TPPI akan

KOMISI VII

Fraksi.pks.id | Jum'at 15 November 2019

f Fraksi PKS DPR RI

c fraksipksdprri

t @fpksdprri

fraksi.pks.id



DPR Tegaskan Pemerintah Harus Segera Kaji Tuntas TPPI

memudahkan kendali pemerintah terhadap perusahaan pengolahan minyak dan petrokimia tersebut.

“Saya melihat upaya pemerintah untuk menguasai saham TPPI ini sangat baik. Jika selama ini Pertamina harus membayar processing fee dan toll fee ke TPPI dalam mengolah minyak mentah, setelah proses penguasaan saham, Pertamina akan lebih bebas mengoptimalkan produksinya terutama ke arah produk-produk petrokimia” ungkapnya.

Rofik menambahkan, upaya tersebut juga akan mampu mendorong produksi Pertamina dalam memenuhi kebutuhan nasional.

“Dengan kapasitas produksi 100.000 barel dan adanya aset yang idle, Pertamina akan mampu memenuhi kebutuhan produk-produk petrokimia dalam negeri hingga 80%, dari saat ini yang hanya bisa memenuhi 40% kebutuhan. Apalagi seiring dengan pengembangan industri hulu migas seperti Blok Masela dan Blok Natuna, bukan tidak mungkin kita akan menjadi yang terdepan dalam pengembangan industri petrokimia di dunia”, tambahnya.

Namun, di balik upaya positif pemerintah tersebut, Rofik juga menyoroti dua permasalahan utama yang harus dituntaskan pemerintah terlebih dahulu sebelum mengangkat PT. TPPI menjadi BUMN.

“Menegenai status usaha, dengan kepemilikan saham yang besar, sudah sewajarnya TPPI menjadi anak usaha PT.Pertamina (Persero). Jika terjadi resiko maupun profit yang dampaknya ke induk usaha, sehingga tidak terlalu menjadi masalah. Namun jika pemerintah mau menjadikan TPPI sebagai BUMN yang mandiri, pemerintah harus mengkaji secara matang dan menyeluruh. Perubahan status TPPI menjadi BUMN akan menimbulkan konsekuensi harus menghasilkan profit sesuai dengan UU BUMN. Padahal, industri petrokimia itu jenis bisnis yang memiliki margin kecil jika tidak ada intervensi dari pemerintah. Jangan sampai setelah menjadi BUMN nanti bukannya menjadi lebih baik namun malah menjadi beban negara dengan penyuntikan PMN setiap tahun. Ini potensi masalah yang serius”, jelasnya.

Selain itu, Rofik juga

menyoroti masalah mega korupsi PT. TPPI yang hingga saat ini masih menggantung. Dia menegaskan, pemerintah harus mengusut tuntas permasalahan tersebut.

“Permasalahan kedua yang harus dituntaskan terlebih dahulu oleh pemerintah adalah terkait kasus kondensat di TPPI. Kerugian negara tidak tanggung-tanggung, hingga mencapai Rp 35 triliun. Kasus korupsi ini terbesar ketiga setelah kasus e-KTP dan BLBI. Pemerintah harus memprioritaskan pena-nganan kasus ini. Seharusnya kasus ini dipastikan terlebih dahulu tuntas dan clear sebelum mempertimbangkan TPPI menjadi BUMN”, tegasnya.

Dia berharap, dengan pertimbangan matang dan penuntasan kasus PT. TPPI sebelum pemerintah memutuskan PT. TPPI menjadi BUMN, PT. TPPI akan benar-benar mampu ontribusi dalam tumbuhan ekonomi nasional sesuai harapan pemerintah.

“Segala perhitungan harus dilakukan dengan tepat, mulai dari proyeksi perusahaan, manajemen pengelolaan, mitigasi resiko, sampai pada perkembangan industri petrokimia secara global. Saya yakin, jika pemerintah mempertimbangkan hal-hal tersebut, juga menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan secara tuntas, sebelum diangkat menjadi BUMN, bukan tidak mungkin TPPI nantinya benar-benar bisa berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional ke depan”, pungkasnya.



berk per-

“Saya minta Menteri memperhatikan persoalan ini secara serius, karena reviktimisasi itu hanya akan memunculkan dendam anak terhadap aparat maupun pemerintah, hal ini tidak bisa dibiarkan, karena anak adalah aset bangsa”

**KH. BUKHORI
YUSUF, Lc., MA**
Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (14/11) — Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mengkritisi terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut Bukhori, peraturan tersebut belum menjangkau perlindungan anak dari pelaku yang mengalami trauma atas tindakan aparat penegak hukum. Hal ini disampaikan Bukhori dalam rapat kerja perdana Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati di Senayan kemarin (13/11)

“Proses penangkapan terhadap terduga terorisme

KOMISI VIII

Fraksi.pks.id | Kamis 14 November 2019

Fraksi PKS DPR RI

fraksipksdprri

@fpksdprri

fraksi.pks.id



PKS: Negara Abaikan Hak Anak Demi Penanganan Terorisme

seringkali mengabaikan dimensi perlindungan anak, hal ini terlihat dari cara-cara densus 88 yang kerap menangkap terduga terorist dengan kekerasan bahkan dilakukan dipekan anak dibawah umur” ungkap Bukhori

Bukhori menyayangkan pola reviktimisasi terhadap anak dari pelaku ini justru tidak masuk dalam lingkup Kemen-PPPA Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

“Saya minta Menteri memperhatikan persoalan ini secara serius, karena reviktimisasi itu hanya akan memunculkan dendam anak terhadap aparat maupun pemerintah, hal ini tidak bisa dibiarkan, karena anak adalah aset bangsa” ujar Bukhori

Lebih lanjut, Bukhori mengungkapkan persoalan Anak Berhadapan dengan Hukum sangat mengkhawatirkan.

“saya melihat catatan akhir tahun 2018 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyatakan bahwa

kasus pelanggaran hak anak pada 2018 mencapai 4.885 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada 2017 yang mencapai 4.579 kasus. Dan dari jumlah itu kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) masih menduduki urutan pertama, yaitu mencapai 1.434 kasus” ungkap Bukhori

Terkait hal itu, Bukhori mengatakan revisi Undang-Undang Perlindungan Anak harus mendapat prioritas komisi VIII.

“Indonesia mengalami darurat perlindungan anak, angka ABH masih cukup tinggi, ditambah lagi anak yang menjadi korban dari proses penegakan hukum, seharusnya revisi UU Perlindungan Anak jadi prioritas legislasi di Komisi VIII” ujar Bukhori.

Selain itu, Bukhori berharap Kemen PPPA dibawah pimpinan I Gusti Ayu Bintang Darmawati memiliki program yang memulihkan perempuan dan

perlindungan anak.

“KemenPPPA itu seharusnya bukan kementerian pemberdayaan perempuan, tapi pemuliaan perempuan, karena jika perempuan dimulihkan niscaya keluarga akan harmoni dan jika keluarga harmoni maka NKRI akan terjaga karena benteng terahir bagi negara adalah keuthan keluarga” tegas Bukhori

Foto : dpr.go.id



Terkait Isu Riset ADB, Kemensos RI Harus Optimalkan BPNT dan PKH

Jakarta (12/11) — ADB (Asian development Bank) baru-baru ini menerbitkan riset, 22 juta penduduk RI kelaparan kronis di zaman Jokowi, Riset tersebut dilakukan

an pada rentang tahun 2016-2018, hingga membuat miris Anggota DPR RI Iskan Qolba Lubis.

Menurut Iskan pemerintah tidak boleh tutup mata dengan kondisi ini, karena merupakan masalah yang serius, yang menyangkut masalah kemiskinan yang akut di negara kita, hingga pada riset tersebut ada sekitar 22 juta penduduk Indonesia yang dilanda kelaparan kronis.

“Soal isu riset dari ADB tersebut, kemensos RI yang juga mitra komisi VIII Harus optimalkan program-program pengentasan kemiskinan, diantaranya program BPNT (Bantuan pangan

pemerintah tidak boleh tutup mata dengan kondisi ini, karena merupakan masalah yang serius, yang menyangkut masalah kemiskinan yang akut di negara kita, hingga pada riset tersebut ada sekitar 22 juta penduduk Indonesia yang dilanda kelaparan kronis.

H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Non tunai) dan PKH (program keluarga Harapan)” ungkap Iskan Qolba Lubis selaku anggota komisi VIII DPR RI

Lebih lanjut Iskan menyampaikan bahwa setiap masalah ada solusinya, maka dari itu, pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi tersebut, di semua lini juga bisa membantu dalam penyelesaian masalah ini, contohnya, kementerian pertanian, harus punya ketersediaan bahan

pangan yang cukup untuk seluruh penduduk Indonesia, juga di kementerian sosial, yang punya program yang bagus yaitu BPNT.

“Program ini pada awalnya bernama Raskin pada tahun 2002, kemudian berganti nama dengan rastra sampai dengan tahun 2017. Dan Alhamdulillah, kalau kami melihatnya ini program yang baik, saat ini saja setiap KPM (keluarga penerima manfaat) mendapatkan Rp 110.000 perbulannya, bahkan untuk 2020 kemensos sudah menganggarkan program ini sekitar 28,1 T untuk 15,6 juta KPM yang masing-masingnya akan menerima sekitar Rp 150 ribu perbulan, anggaran ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya 20,1 T, dan untuk keluarga penerima manfaat juga naik skitar 5 juta, dari 10,3

juta pada tahun sebelumnya” Pungkasnya.

Iskan menambahkan ada lagi program PKH, yang akan menasar 10 juta lebih penduduk Miskin Indonesia, sebenarnya kemensos RI, hanya tinggal mengoptimalkan program-programnya saja, dan alokasi yang dianggarkan ini jangan sampai bocor, contohnya seperti yang disampaikan kepala BULOG (Budi waseso) yang lalu, bahwa dana BPNT ini bocor 5 T setiap tahunnya, akibat permainan mafia-mafia berass.

“Dan yang terpenting adalah program-program ini harus tepat sasaran sehingga potensai Negara ini dilanda kelaparan kronis itu hilang sama sekali,” tuturnya.

Iskan juga menyampaikan bahwa Fraksi PKS DPR RI siap mengawal program-program pemerintah, khususnya yang bermitra di komisi VIII, termasuk KEMENSOS RI.

“agar pengentasan kemiskinan di Indonesia berjalan secara komprehensif serta efektif dan efisien”. Tutup Iskan.



Sikap PKS Terkait Kenaikan Iuran BPJS

Selasa, 12 November 2019

Mempertimbangkan kondisi yang terjadi dan beragam masukan dari masyarakat, Fraksi PKS mengambil sikap terkait kenaikan iuran BPJS sebagai berikut

- 1 Terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sesuai Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengamantatkan bahwa setiap orang atau warga negara berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.
- 2 Fraksi PKS memahami dalam perjalanan BPJS Kesehatan mengimplementasikan amanat Undang-Undang sejak 2014 tak pernah sepi dari kontroversi, mulai dari kelembagaan hingga operasional seperti keresahan pasien mengalami sukarnya mengakses pelayanan kesehatan, keresahan profesi kesehatan karena dibatasi dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas, keresahan industri farmasi dan perumahsakitankarena keterlambatan pembayaran, beberapa pemerintah daerah menilai lebih baik tidak bekerjasama dengan

BPJS, hingga isu tentang tidak syariahnya sistem BPJS yang sempat mencuat ke public lalu tenggelam tanpa kabar.

3 Fraksi PKS mengakui bahwa kehadiran BPJS Kesehatan telah memberikan bentuk baru beserta harapan untuk lebih baik dalam pelayanan kesehatan dibandingkan yang selama ini berjalan, cukup banyak juga hal positif yang mampu dimunculkan.

4 Fraksi PKS menolak kenaikan premi JKN bagi peserta bukan penerima upah (PBBU) dan bukan pekerja (BP) kelas III.

5 Fraksi PKS mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mencari pembiayaan terhadap selisih kenaikan iuran JKN bagi peserta bukan penerima upah (PBBU) dan bukan pekerja (BP) kelas III selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2019.

6 Fraksi PKS mendesak BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan untuk memfinalisasi data cleansing terhadap sisa data PBI APBN bermasalah hasil audit dengan tujuan tertentu atas aset Jaminan Sosial Kesehatan tahun 2018 oleh Badan Pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP), selambatlambatnya akhir november 2019.

7 Kenaikan iuran BPJS tanpa adanya proses pembenahan dan pemilahan data kepesertaan dapat dipastikan akan membebani masyarakat. Kunci penyelesaian defisit BPJS Kesehatan bukan dengan menaikkan iuran yang dibebankan pada peserta tapi pada perbaikan manajemen BPJS,

8 kepesertaan, termasuk skema pendanaan dari negara. Fraksi PKS mendesak BPJS Kesehatan untuk segera menyelesaikan tunggakan klaim rumah sakit-rumah sakit di seluruh Indonesia. Kami meminta pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab mencari solusi pendanaan lain dan tidak membebankan ke rakyat. Jaminan kesehatan ini isu dan kebutuhan dasar rakyat. Fraksi PKS mendesak Kementerian kesehatan RI untuk meningkatkan jumlah tempat tidur (TT) kelas III di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).
9 Tanggung jawab pemerintah terhadap aspek dasar kesehatan yaitu, perhatian yang lebih besar pada aspek promotif preventif dengan menggalakkan program hidup sehat





DISKUSI PUBLIK
Sehatkan BPJS
Sehatkan INDONESIA



Saya katakan kepada Pak Menteri dan Dirut BPJS, 'Pak, walaupun mereka diperas yang keluar bukan premi atau iuran, tapi darah dan air mata masyarakat ketika premi ini dinaikkan

Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si

WAKABID KESRA FRAKSI PKS DPR RI

Makassar (15/11) — Rencana naiknya iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2020 mendapat respon masyarakat di Makassar, Sulawesi Selatan.

Respon tersebut disampaikan kepada Anggota DPR RI Komisi IX Netty Prasetyani, dalam kunjungan kerjanya ke Makassar, Jumat, (15/11).

Menurut Netty, Masyarakat Makassar sangat kecewa dengan rencana pemerintah secara sepihak menaikkan iuran BPJS. "Denyut nadi kehidupan

KUNKER KOMISI IX KE MAKASSAR

Netty: Rakyat Tunjukkan Kekecewaan pada BPJS dengan Lugas

masyarakat teresik dengan informasi kenaikan BPJS. Saya merasakan betul keadaan ini di lapangan" ujar Netty Prasetyani Wakil Ketua Fraksi PKS bidang Kesejahteraan Rakyat ini menyampaikan kenaikan iuran BPJS menjadi isu terpanas dalam bulan ini.

"Perbincangan terkait kenaikan BPJS sampai kepada lapisan masyarakat paling bawah sebagai entitas yang

merasakan langsung dampaknya", tegasnya.

Menurut Netty yang dalam waktu bersamaan juga melakukan kunker ke Bali, Di Yogyakarta dan Sulawesi Selatan berkata ia banyak mendengar, mengumpulkan, dan menerima masukan dari berbagai stakeholder terkait 'Dampak Kenaikan Iuran BPJS' di Provinsi Sulawesi Selatan.

"Pihak Dinkes menyampai-

kan permintaan Rumah Sakit agar BPJS segera melunasi klaim yang sudah diajukan. Kelugasan masyarakat Makassar dalam mengekspresikan dampak kenaikan iuran BPJS menggambarkan keluhan 'seindah warna aslinya," imbuh Netty.

Netty berjanji menampung aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan, "Yang jelas saya sebagai perwakilan FPKS dan

anggota komisi IX DPR RI akan mendorong agar persoalan segera diselesaikan," tutupnya.

Foto : dpr.go.id



Perbincangan terkait kenaikan BPJS sampai kepada lapisan masyarakat paling bawah sebagai entitas yang merasakan langsung dampaknya

**Dr. Hj. NETTY
PRASETIYANI, M.Si.**
Anggota Komisi IX DPR RI



Kebijakan *cost sharing* ini, akan memi-
cu masyarakat yang
akan berobat ke
rumah sakit lebih
selektif. Akan ada
manajemen meng-
ukur diri sendiri pada
masyarakat, sampai
sejauh mana perlu
berobat lanjut ke
rumah sakit

**dr. H. ADANG
SUDRAJAT, MM,AV.**
Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (12/11) – Carut Marut
permasalahan BPJS yang
terguncang akibat cash flow
yang buruk secara jangka
pendek, akan mampu
diselesaikan dengan metode
cost sharing bagi pengguna
fasilitas, sebagaimana
disampaikan anggota komisi IX
DPR, Adang Sudrajat.

Politisi PKS ini
mengatakan, bahwa kebijakan
yang akan dilakukan oleh
pemerintah dengan menaikkan
iuran BPJS hingga 100% yang
berlaku awal 2020 mendatangi
akan membuat kekacauan
masal karena akan
menimbulkan alokasi
pengeluaran anggaran baru
bagi seluruh rumah tangga
Indonesia. Meski ada
kesepakatan bersama antara

KOMISI IX

Fraksi.pks.id | Selasa 12 November 2019

f Fraksi PKS DPR RI

© fraksipksdprri

@fpxksdprri

fraksi.pks.id



Cost Sharing Mampu Selesaikan Defisit BPJS

DPR dan Pemerintah untuk
tidak menaikkan peserta BPJS
kelas 3, namun untuk kelas II
dan kelas I akan terjadi
kekacauan rumah tangga yang
jumlah pesertanya cukup besar.

“BPJS ini defisit sebesar
sekitar 32 triliun. Sedangkan
peserta BPJS bisa diamsikan
sekitar 100 juta jiwa. Bila selisih
bayar 19 ribu rupiah per kepala
dengan asumsi kenaikan dari
23 ribu rupiah menjadi 42 ribu
rupiah, maka potensi
penerimaan peserta bpjs
adalah 1,9 Triliun. Artinya
diperlukan 16 bulan untuk
menghabiskan defisit lama,
padahal akan ada komponen
biaya baru yang menambah
defisit BPJS”, urai Adang.

Legislator asal Bandung ini
mengatakan, pemerintah perlu
meninjau kembali Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 75
Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Perpres Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan
Kesehatan yang diteken Jokowi
pada 24 Oktober 2019. Ia
berkeyakinan, tujuan
pemerintah dengan aturan
tersebut akan meningkatkan
kualitas dan kesinambungan
program jaminan kesehatan
akan sulit dicapai. Penyesuaian
beberapa ketentuan dalam



Peraturan Presiden Nomor 82
Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan memang perlu
dilakukan, namun caranya
jangan dengan cara instan
menaikkan iuran BPJS.

“Saya terus – menerus
mendapat keluhan dari
berbagai keluarga di komplek
perumahan dengan
perekonomian menengah,
bahwa iuran mandiri kelas I
yang tadinya sekeluarga 4 anak
bayar Rp. 492.000,- rupiah,
nanti tahun 2020 bakal
bayar hampir 1 juta rupiah,
sebesar 984 ribu rupiah. Ini
terjadi akibat pada peserta
iuran BPJS kelas I, kenaikannya
100% dari Rp80 ribu menjadi
Rp160 ribu per peserta per

bulan. Ini berlaku per 1 Januari
2020”, kata Adang.

Anggota FPKS ini
mengusulkan pada pemerintah,
kebijakan tanpa menaikkan
semua peserta BPJS baik kelas
I, II maupun III dapat dilakukan
dengan cara *cost sharing* pada
tagihan pasien. Misal tagihan
pasien adalah 10jt rupiah,
maka dapat di bagi 30%
ditanggung pasien, 70%
ditanggung BPJS. Kebijakan
cost sharing ini hanya berlaku
pada peserta kelas I dan II saja.
Sedangkan kelas III dibayar
100% oleh BPJS.

Kebijakan *cost sharing* ini,
lanjut Adang, akan memicu
masyarakat yang akan berobat
ke rumah sakit lebih selektif.

Akan ada manajemen
mengukur diri sendiri pada
masyarakat, sampai sejauh
mana perlu berobat lanjut ke
rumah sakit. Penggunaan alat
diagnostik yang mahal akan
berkurang, karena pasien tidak
akan berani meminta dan akan
berdasarkan indikasi yang kuat
saja. Pada kasus fraud, akan
jauh menurun karena pasien
akan melakukan self verifi-
cation atas biaya yang terjadi.

Adang mengusulkan
kepada pemerintah, bahwa dari
pada menarik iuran yang
memberatkan masyarakat
akibat kenaikan BPJS, lebih baik
pemerintah mendorong alokasi
iuran di arahkan pada upaya
mandiri masyarakat untuk
promotif dan preventif.

Mayarakat difasilitasi untuk
bergabung pada klub-klub
kebugaran dan jalan sehat atau
sepeda sehat yang intinya untuk
menjaga kesehatan. Karena
boleh jadi, masyarakat yang
mampu bayar iuran kelas I ada
yang terdiri dari mereka yang
mampu secara ekonomi dan
berada pada kelas menengah
dalam strata sosialnya.

“Pemerintah bisa menguji
usulan saya ini dengan berbagai
simulasi. Simulasi apapun
dapat dilakukan, asal jangan
menaikkan iuran BPJS di kelas
manapun. Akan terjadi keadilan
yang lebih baik pada kebijakan
cost sharing ini, karena yang
terbebani 30% biaya hanya yang
menggunakan fasilitas saja”,
tutup dokter Adang.

ini apa permasalahanannya kita tidak pernah mendapatkan keuntungan dari segi ekonominya? Kalo mungkin sisi sosialnya ini merupakan satu kekuatan untuk merajut bangsa ini, dan ini merupakan marwah dari bangsa Indonesia itu sendiri”

**Hj. SAKINAH
ALJUFRI, S.Ag**

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (13/11) – Pembangunan venue untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 yang akan dihelat di Papua saat ini menjadi perhatian Anggota DPR RI Fraksi PKS Sakinah Aljufri.

Anggota DPR dari Wilayah Indonesia Timur ini menyampaikan venue yang dibuat merupakan bangunan baru, ada 30 venue yang akan digunakan untuk menggelar 37 cabang olahraga dan 679 nomor pertandingan, dengan

Pembangunan Venue PON XX Tahun 2020 Menjadi Sorotan PKS

dana Miliaran Rupiah.

“Dana yang digelontorkan untuk PON ini sangat besar, tentunya kita berharap setiap event yang dilakukan mempunyai dampak sosial dan dampak ekonomi”, ungkap Sakinah di ruang rapat komisi X Rabu, 13/11/2019.

Lebih lanjut sakinah mengatakan tentunya semua event itu pasti untung, tetapi yang menjadi keheranan kita, kita tidak pernah untung.

“ini apa permasalahannya kita tidak pernah mendapatkan keuntungan dari segi ekonominya? Kalo mungkin sisi sosialnya ini merupakan satu kekuatan untuk merajut bangsa ini, dan ini merupakan marwah dari bangsa Indonesia itu sendiri”, tandasnya.

Namun demikian, Sakinah Aljufri Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah berharap venue yang akan dibangun dengan biaya yang mahal nantinya tidak mangkrak setelah perhelatan PON. Dirinya berharap, venue yang telah dibangun dapat berguna untuk masyarakat.

“Venue yang telah dibangun diharapkan setelah selesai PON dapat digunakan untuk ruang publik, dan jangan sampai venue yang telah dibangun jadi mangkrak dan tidak berguna.” tegasnya.

Dalam rapat komisi X ini Sakinah juga menyoroti masalah penghargaan untuk para atlet berprestasi yang sudah pensiun. Sakinah memaparkan bahwa pemberian penghargaan untuk atlet sangatlah penting untuk memajukan olahraga.

“Ada sesuatu yang harus diberikan kepada atlet yang berprestasi dan sudah pensiun, sehingga orang itu bersimpati dan berkeinginan untuk memajukan olahraga kita”, pungkasnya.



“Secara umum kondisi ketenagakerjaan Indonesia pada Agustus 2019 cenderung menurun dibandingkan Februari 2019. Jumlah pengangguran melonjak mencapai 7,05 juta (Agustus 2019) dari 6,82 juta (Februari 2019).

Ir. H. A. JUNAIDI AULY, MM

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (11/11) — Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu mencapai level lebih tinggi. Pada triwulan III-2019, pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5,02%. Angka pertumbuhan 5%-an diikuti dengan penurunan kualitas pertumbuhan. Hal itu terlihat dari penurunan peranan sektor-sektor berbasis tenaga kerja (labor incentive) terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor-sektor labor incentive (pertanian, pertambangan, dan

Junaidi Auly: Ekonomi Melambat, Tenaga Kerja Tersendat

industri pengolahan) pada triwulan III-2019 turun menjadi 39,99%. Pada beberapa triwulan sebelumnya, kontribusi sektor tersebut masih sekitar 40%.

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly melihat bahwa pekerjaan pemerintah ke depan cukup berat, karena struktur ekonomi nasional semakin meninggalkan sektor-sektor tradeable atau labor incentive dan bergerak ke sektor jasa.

"Padahal, struktur tenaga kerja Indonesia masih ditopang oleh tenaga kerja berpendidikan rendah", ujar Junaidi.

Legislator asal Lampung ini melanjutkan, Pada Agustus 2019, jumlah tenaga kerja berpendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar ke Bawah mencapai 72 juta atau sekitar 56% dari total tenaga kerja. Persoalan lainnya hadir lewat tingginya angka pengangguran pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendidikan tinggi. Sekitar 10,4% lulusan SMK menganggur, sedangkan lulusan Diploma I/II/III serta

lulus universitas yang menganggur masing-masing 5,99% dan 5,67%.

"Secara umum kondisi ketenagakerjaan Indonesia pada Agustus 2019 cenderung menurun dibandingkan Februari 2019. Jumlah pengangguran melonjak mencapai 7,05 juta (Agustus 2019) dari 6,82 juta (Februari 2019). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga melonjak menjadi 5,28% pada Agustus dari 5,01% pada Februari 2019. Sinyal penurunan sektor ketenagakerjaan memang sudah terlihat," pungkas Bang Jun sapaan akrabnya.

Junaidi merinci beberapa diantaranya adalah perlambatan realisasi investasi maupun penurunan realisasi belanja modal pemerintah. Proyek-proyek tersebut menjadi salah satu sate penentu penyerapan tenaga kerja. Belanja modal hanya terealisasi

Rp 63 triliun atau 33% dari APBN-2019. Angka tersebut turun sekitar 11% dari tahun sebelumnya," tutup Junaidi.



Naiknya Angka Pengangguran, Pemerintah Harus Bertanggungjawab

Jakarta (13/11) — Rilis BPS terbaru tentang perkembangan sektor ketenagakerjaan mengkhawatirkan.

Bagaimana tidak, pengangguran meningkat menjadi 7,05 juta pada Agustus 019 dari Februari 2019 yang di angka 6,8 juta.

Dari sisi persentase, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus mencapai 5,28 persen; naik dari 5,01 persen pada

Februari 2019.

Jika meme rhatikan berb agai

indikator, dapat dikatakan sektor ketenagakerjaan tertekan cukup nyata.

Anggota komisi XI DPR RI Ecky Awal Muharam mengingatkan bahwa tekanan terhadap sektor ketenagakerjaan cukup tinggi. Persoalan diawali dari kegagalan mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, sehingga stimulus terhadap ekspansi bisnis juga gagal. Realisasi investasi juga menurun, karena iklim berusaha yang tidak kunjung membaik.

"Beberapa rilis lembaga dunia tentang daya saing ekonomi, tidak menempatkan Indonesia sebagai negara yang menarik untuk tujuan investasi" ujar Ecky di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta (13/10/2019).

Disisi lain Ecky menambahkan ekonomi terus bergantung pada kekuatan konsumsi rumah tangga, sehingga aktivitas produktif cenderung terbatas.

"Saya sangat khawatir bahwa kondisi ketenagakerjaan ini terus memburuk. Menurut data

Tekanan terhadap sektor ketenagakerjaan cukup tinggi. Persoalan diawali dari kegagalan mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, sehingga stimulus terhadap ekspansi bisnis juga gagal. Realisasi investasi juga menurun, karena iklim berusaha yang tidak kunjung membaik.

H. ECKY AWAL MUCHARAM

Anggota Komisi XI DPR RI

Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah angkatan kerja yang bekerja pada Agustus 2019 hanya 126,51 juta; yang turun dari 129,36 juta pada Februari 2019. Artinya, ada sekitar 2,85 juta tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan selama 6 bulan terakhir." Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Ecky memaparkan bahwa, situasi ketenagakerjaan semakin rumit karena daya saing sumberdaya manusia kita pun belum cukup prima.

"Tantangan itu meningkat, karena penetrasi teknologi dan revolusi industri 4.0 yang memaksa tenaga kerja untuk mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis, di tengah-tengah pendidikan yang masih rendah dan kondisi lingkungan ekonomi belum kondusif", tutup Ecky.

“Saya secara khusus menyoroti tentang Indikator Kerja Utama (IKU) tentang ekonomi syariah, karena Gubernur BI sendiri menyampaikan bahwa ekonomi syariah tadi itu akan dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi

**Dr. Hj.
ANIS BYARWATI,
S.Ag.,M.Si.**

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (12/11) — Anggota DPR RI Komisi XI Anis Byarwati menyoroti pengembangan ekonomi syariah oleh Bank Indonesia dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Bank Indonesia, Senin, (11/11/2019).

Menurut Anis pengembangan ekonomi syariah oleh Bank Indonesia (BI) yang disebut Gubernur BI Perry

PKS Soroti Pengembangan Ekonomi Syariah oleh Bank Indonesia

Warjiyo sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia itu perlu dijelaskan lebih dalam argumentasinya.

“Saya secara khusus menyoroti tentang Indikator Kerja Utama (IKU) tentang ekonomi syariah, karena Gubernur BI sendiri menyampaikan bahwa ekonomi syariah tadi itu akan dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi,” kata Anis.

Anis menyampaikan hal tersebut di sela rapat kerja Komisi XI DPR dengan BI yang membahas evaluasi kinerja dan pengantar Rencana Anggaran Tahunan BI di Gedung Parlemen.

Menurut Anis, IKU tentang pertumbuhan ekonomi syariah yang ditargetkan BI masih belum tercapai, di mana BI membidik pertumbuhan ekonomi syariah sebesar 6,5 persen, namun realisasinya masih di angka 4,8 persen.

“Ekonomi syariah menjadi program strategisnya BI tahun depan untuk dikembangkan. Oleh karena itu, kami ingin

mengetahui apa yang dilakukan untuk mencapai target tersebut,” ujar Anis.

Terlebih, Indonesia meraih skor 81,93 pada Islamic Finance Country Index (IFCI) 2019 yang membawa Indonesia duduk pada peringkat pertama pasar keuangan syariah global menurut Global Islamic Finance Report 2019.

“Kita telah berada di posisi pertama, yang sebelumnya ditempati Malaysia. Untuk itu, penting mengetahui program yang akan dijalankan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia,” kata Anis.

Menurut Anis, hal lain yang menjadi alasan perlunya BI memberikan perhatian terhadap ekonomi syariah karena ekonomi syariah khususnya perbankan syariah telah terbukti sangat diminati oleh perbankan.

“Banyak bank konvensional yang membuka unit syariah sebagai salah satu unit usahanya. Demikian juga dengan produk halal bahkan wisata kuliner halal yang

merupakan bagian dari industri ekonomi syariah mulai berkembang dan mempengaruhi ekonomi nasional,” ujarnya.

Oleh karena itu Anis meminta BI lebih memperhatikan sektor ekonomi syariah dengan meningkatkan kinerjanya sehingga menjadi industri yang kuat menopang perkembangan ekonomi nasional.

Foto :
dpr.go.id



Upaya Penyederhanaan Aturan Melalui RUU Omnibus Law: Pemerintah Kurang Serius

untuk membangun iklim usaha dan investasi yang baik bukan hanya membutuhkan penyederhanaan regulasi, tetapi juga kehandalan dan integritas birokrasi serta tumbuhnya budaya pelayanan aparat”

**Dr. H. MULYANTO,
M.Eng**

Anggota BALEG DPR RI

Jakarta (14/11) — Atas arahan Presiden Jokowi, Menkopohukam Mahfud MD, pada Raker dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu 13/11/2019,

menyatakan bahwa Indonesia sudah terlalu banyak UU, over regulasi dan terjadi tumpang-tindih regulasi, sehingga menghambat bagi perizinan usaha.

Untuk itu perlu disederhanakan melalui pengajuan RUU Omnibus Law. Dengan RUU ini, maka pasal-pasal dalam undang-undang lain yang bertentangan dengan RUU Omnibus Law dapat dibatalkan sekaligus, tidak satu-persatu.

Menanggapi tentang Omnibus Law, Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS menilai upaya pemerintah untuk melakukan deregulasi melalui omnibus law sangat diharapkan masyarakat, baik investor luar negeri maupun domestik.

“Itu adalah ide yang bagus. Dan kami menyambut baik”, kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI.

Namun menurut Mulyanto, sayangnya persiapan Pemerintah terkait pengajuan RUU omnibus law terkait cipta lapangan kerja dan

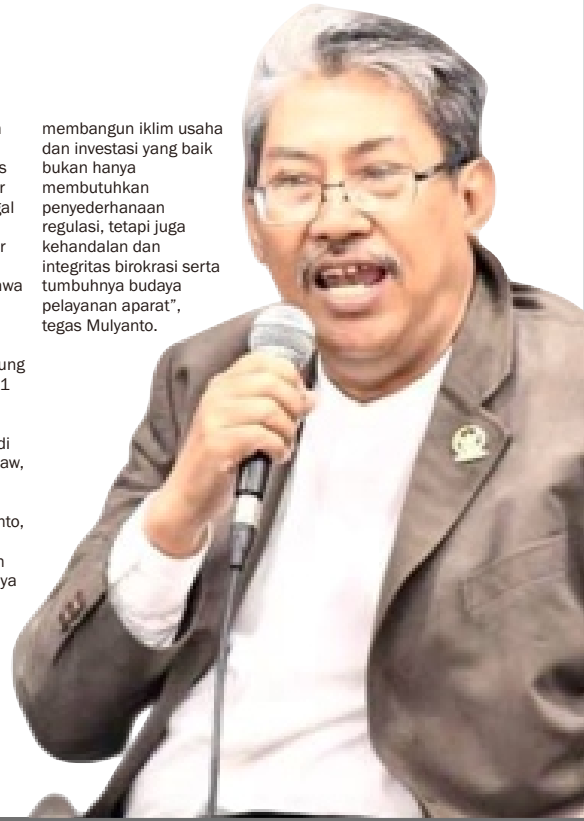
pemberdayaan UMKM masih sangat minim. Sementara proses penetapan Prolegnas semakin sempit sampai akhir Masa Persidangan I ini tanggal 12 Desember 2019.

“Kita semua mendengar dari paparan para menteri terkait dalam Raker tadi, bahwa pemerintah masih dalam persiapan awal. Belum ada Naskah Akademik dan Rancangan RUU-nya. UU Payung terkait, yakni UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang akan menjadi cantolan bagi RUU omnibus law, juga belum direvisi”, tambah Mulyanto.

Pemerintah kata Mulyanto, masih memilah-milah norma mana yang akan dimasukkan dalam RUU Omnibus Law. Saya mencatat ada 8 tema dan kemungkinan akan bertambah.

“Terus terang saya jadi meragukan keseriusan dan kerja cepat Pemerintah dalam penyederhanaan regulasi perijinan usaha ini. Padahal untuk

membangun iklim usaha dan investasi yang baik bukan hanya membutuhkan penyederhanaan regulasi, tetapi juga kehandalan dan integritas birokrasi serta tumbuhnya budaya pelayanan aparat”, tegas Mulyanto.



PARTAI KEADILAN



PKS

R  K O R N A S 2 0 1 9

Semakin Kokoh Melayani Rakyat

Hotel Bidakara, Jakarta
14-16 November 2019



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



Website
fraksipks.id



Instagram
[fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)



Twitter
[@fraksipksdprri](https://twitter.com/fraksipksdprri)



Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi.PKS.DPR.RI)



Telegram
[@PKSart](https://www.telegram.com/@PKSart)

R KORNAS 2019
Semakin Kokoh
Melayani Rakyat

R KORNAS 2019
Semakin Kokoh
Melayani Rakyat

R KORNAS
Hotel Bidakara, Jakarta
14-16 November 2019
Semakin Kokoh
Melayani Rakyat



PKS Gelar Rakornas 2019

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2019 pada Kamis (14/11) hingga Sabtu (16/11).

Pimpinan dan anggota Fraksi PKS turut hadir dalam pembukaan Rakornas yang di selenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta itu.

Menurut Ketua DPP

PKS Bidang Humas Ledia Hanifa, Rakornas PKS 2019 akan fokus pada dua hal, penguuhan sikap politik PKS terhadap Pemerintahan Joko Widodo-Ma'rif Amin dan Pencanangan Tahun Rekrutmen.

Foto : PKS Foto.



Kapasitas atau size intelektual struktur dan kader PKS harus lebih besar dari masalah dan tantangan yang dihadapi. Ini prasyarat kita untuk meraih kemenangan besar

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

KETUA FRAKSI PKS DPR RI

Rakornas untuk Tingkatkan Kapasitas Kemenangan PKS

dicanangkan.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengatakan Rakornas PKS diselenggarakan dalam rangka memastikan kapasitas kemenangan struktur PKS pusat hingga daerah.

"Kapasitas atau size intelektual struktur dan kader PKS harus lebih besar dari masalah dan tantangan yang dihadapi. Ini prasyarat kita untuk meraih kemenangan besar," kata Jazuli di hadapan ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi se-Indonesia dalam satu sesi Rakornas.

Jika struktur dan kader PKS sudah memiliki size intelektual yang lebih besar dari masalah yang dihadapi, Jazuli optimis akan lahir inovasi dan kreativitas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan kebutuhan rakyat.

"Dengan cara itulah rakyat merasakan betul manfaat kehadiran PKS karena selalu menjadi solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi. Dan, itulah hakikat khidmat kepada rakyat," pungkask Jazuli.

Relevan dengan itu, Anggota Komisi I ini



mencontohkan lahirnya gagasan "Hari Aspirasi" yang diinisiasi Fraksi PKS DPR RI di awal tahun 2015. Program Hari Aspirasi ini telah dicanangkan sebagai program nasional Fraksi PKS di seluruh DPRD (provinsi dan kabupaten/kota).

"Ini program inovatif dan genuine kita untuk mendekati diri dengan rakyat, mendengar keluh kesah, permasalahan dan kebutuhan mereka. Lalu, dengan kewenangan yang kita

miliki kita berusaha menyelesaikannya atau memberi solusi. Dengan hari aspirasi rakyat kita ingin tidak ada pembatas antara rakyat dan wakilnya," tandas Jazuli.

Ke depan, lanjut Jazuli, kader-kader PKS – khususnya yang diberi amanah di legislatif – dituntut untuk semakin banyak memproduksi ide dan gagasan yang kreatif inovatif dalam menangkap dan memperjuangkan kepentingan kerakyatan, keummatan, dan

dalam rangka mengkokohkan nasionalisme Indonesia.

Rakornas PKS kali ini mengambil tema "Kokoh Berkhidmat untuk Rakyat", dihadiri seluruh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTT) PKS dan seluruh unsur Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS seluruh Indonesia. Rakornas sekaligus menjadi ajang evaluasi pilkada serentak 2017 dan konsolidasi PKS menyongsong pilkada serentak 2018 dan Pileg-Pilpres 2019. (rnn)

RAKORNAS
Hotel Bidakara, Jakarta
14-16 November 2019
2019
**Semakin Kokoh
Melayani Rakyat**

Partai Keadilan Sejahtera menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Bumiwiayata Depok yang akan berlangsung selama tiga hari 8-10 Maret 2017.

Rakornas ini diisi dengan arahan Ketua Majelis Syuro PKS, pidato Presiden Partai, dan dilanjutkan Workshop bidang/badan DPP dengan struktur di bawah untuk memastikan pelaksanaan program kerja yang sudah

“Semangat Rakornas adalah memperbesar PKS menjadi pemenang Pemilu 2024, untuk tujuan semakin meningkatkan pelayanan kepada rakyat sekaligus memperkokoh NKRI menjadi negara kuat berdaulat yang diakui dunia Internasional”

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Fraksi PKS DPR RI

RAKORNAS
Hotel Bidakara, Jakarta
14-16 November 2019
2019
Semakin Kokoh
Melayani Rakyat

Jakarta (15/11) — Pada Rakornas PKS 14 sampai dengan 16 November 2019 yang juga ikut hadir anggota DPR MPR, Nevi Zuirina menerima arahan dari Ketua Majelis Syuro, Dr. Salim Segaf Al Jufri, agar PKS semakin besar bahkan bila perlu mencapai nomor satu di pemilu 2024.

Nevi menerangkan, bahwa membesarnya PKS ini bertujuan untuk semakin meluaskan

RAKORNAS PKS 2019

Fraksi.pks.id | Jum'at 15 November 2019

Fraksi PKS DPR RI

fraksipksdprri

@fpksdprri

fraksi.pks.id



Menjadi Partai Besar, PKS Siap Tingkatkan Pelayanan Pada Rakyat dan Perkokoh NKRI

jangkauan pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas bakti PKS kepada Negeri tercinta Indonesia. NKRI ini perlu menyeimbangkan dalam penanganannya dalam menjalankan pemerintahannya. Selama pemerintahan itu berada pada rel yang tepat, maka PKS akan ikut mendukung sukseskannya terutama pada program-program kerakyatan yang langsung menyentuh kehidupan dalam rumah-rumah warga Indonesia.

“Posisi PKS saat ini adalah Oposisi. Bukan berarti benci atau selalu kontra dengan pemerintah. PKS hadir sebagai penyeimbang, untuk memastikan bahwa pemerintahan itu ada pada jalan yang sesuai amanat pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta nilai-nilai dasar bangsa dalam adat-istiadat yang ada tiap daerah”, ucap Nevi.

PKS lanjut Nevi, yang hadir lebih dari 20 tahun dengan berbagai dinamikanya, merupakan salah satu komponen bangsa yang terus

mengajak bergerak cepat kepada pemangku kebijakan pada rel yang telah digariskan. Karakter pergerakan cepat, jika meleset beberapa mili saja di tempat pusran, maka akan melenceng jauh pada ujung tujuannya.

“Untuk itu, memastikan pergerakan cepat dan tepat diperlukan semua pihak, untuk mengejar keteringgalan bangsa kita dalam bersaing dengan negara-negara di dunia ini”, imbuhnya.

Legislator Sumatera Barat ini menerangkan, sesuai arahan ketua Majelis Syuro, bahwa PKS bukan partai yang pragmatis. Ini adalah landasan utama partai untuk dijalankan para aktivisnya. Nilai-nilai persaudaraan, saling menjaga dan mengingatkan adalah alat kontrol internal agar partai ini tetap pada jalannya, agar tetap terdapan dalam integritas moral dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. PKS telah membuktikan, meskipun berada pada posisi oposisi, tapi tetap berangkuhan dengan seluruh elemen dimanapun



berada, bukan saja dalam arti fisik, tapi sebagai simbol bahwa PKS akan ikut berpartisipasi dalam kebaikan, akan mencegah ketika hak-hak rakyat sudah mulai diabaikan.

“Semangat Rakornas adalah memperbesar PKS menjadi pemenang Pemilu 2024, untuk tujuan semakin meningkatkan pelayanan kepada rakyat sekaligus memperkokoh NKRI menjadi

negara kuat berdaulat yang diakui dunia Internasional”, tutup Nevi Zuirina.

Ket Foto : Anggota Parlemen Perempuan Hj. Nevi Zuirina bersama Hj. Nur Azizah Tamhid menyempatkan berfoto bot di arena Rakornas. Credit Foto : Melany (PKS Foto)

LIPUTAN MEDIA | medcom.id

PKS Mempertegas Sikap Politik di Rakornas

Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berulang kali menyatakan bakal menjadi oposisi. Sikap politik PKS itu akan dipertegas saat gelar rapat koordinasi nasional (rakornas).

"Fokusnya pada pengokohan posisi PKS terhadap Pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf," kata Ketua DPP PKS Bidang Humas Ledia Hanifa kepada Medcom.id, Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Rakornas akan dihadiri sekitar 500 kader PKS dari tingkat wilayah hingga pusat. Acara ini juga sebagai ajang pencanangan tahun rekrutmen anggota.

Rakornas akan dihadiri Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri, Presiden PKS Mohamad Sohibil Iman, Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Forum ini dibuka pada Kamis, 14 November 2019, sekitar pukul 13.00 WIB. Persiapan Pemilu 2024 dan Pilkada 2020 akan dibahas dalam forum ini.

Foto :
PKS Foto.

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Kabid Humas DPP PKS



Mardani Kutuk Serangan Udara Israel Ke Gaza

Jakarta (15/11) — Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mengutuk serangan udara Israel ke wilayah Gaza sejak Selasa (12/11). Serangan itu setidaknya telah menewaskan sedikitnya 32 warga Palestina termasuk seorang bocah berusia 7 tahun.

“Saya mengutuk serangan Isreal kepada warga Palestine di Gaza! Saya mengajak seluruh parlemen di dunia untuk mengecam sikap bar-bar Israel kepada warga Palestine atas tindakan genosida, pembunuhan berencana dan perebutan tanah secara paksa sejak tahun 1967,” kata Mardani, Jumat (15/11).

Hingga Rabu (13/11) malam waktu setempat, militer Israel mengklaim ada 360 roket yang ditembakkan dari Gaza ke wilayahnya. Namun sejauh ini tidak ada korban jiwa dari pihak Israel. Diklaim Israel bahwa sekitar 90 persen roket yang ditembakkan ke wilayahnya berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iron Dome.

Lagislator Fraksi PKS DPR RI ini juga mendesak Pemerintah Indonesia harus segera menyampaikan sikap protes kepada Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) atas serangan Israel kepada warga Gaza, Palestina ini.

“Pemerintah Indonesia harus segera menyampaikan protes keras atas peristiwa genosida ini dan mengajak Pemerintah negara lain tindakan Israel yang terus menerus melanggar peraturan Konvensi Jenewa tahun 1949,” kata Mardani.

Dalam Peraturan Konvensi Jenewa tahun 1949 dilarang menyerang kota atau desa lawan, “Isreal sangat brutal namun tidak ada berani yang memberikan sanksi padahal terus menerus melanggar Law of Armed Conflict (LOAC) menyerang bangunan penduduk dan membunuh penduduk sipil termasuk anak kecil,” kata dia.


Mardani menyampaikan alasan kenapa Indonesia harus cepat merespon serangan Israel ke Gaza ini karena dalam Alenia pembukaan UUD 1945, Indonesia sangat konsern atas tindakan penjajahan di dunia karena tidak sesuai dengan perikeamanusiaan dan perikeadilan.

“Israel sudah sejak lama melakukan penjajahan, genosida, pembunuhan

terencana dan perebutan tanah secara paksa kepada negara Palestina, oleh karena itu negara Indonesia harus terdepan merespon tindakan ini,” pungkasnya.

Konflik terbaru ini pecah setelah Israel pada Selasa (12/11) pagi menewaskan seorang komandan senior militan Jihad Islam, Bahaa Abu el-Atta (41), dalam serangan udaranya. Otoritas Israel menyebut Abu el-Atta bertanggung jawab atas rentetan serangan roket dan merencanakan serangan skala besar lainnya.

Foto :
aljazeera



Israel sudah sejak lama melakukan penjajahan, genosida, pembunuhan berencana dan perebutan tanah secara paksa kepada negara Palestine, oleh karena itu negara Indonesia harus terdepan merespon tindakan ini

Dr. MARDANI, M.Eng

Wakil Ketua BKSAP DPR RI



Mardani Kutuk Serangan Udara Israel Ke Gaza

fraksi.pks.id | Jum'at 15 November 2019 | Image Istimewa



Saya mengutuk serangan Israel kepada warga Palestine di Gaza!

Saya mengajak seluruh parlemen di dunia untuk mengecam sikap bar-bar Israel kepada warga Palestine atas tindakan genosida, pembunuhan terencana dan perebutan tanah secara paksa sejak tahun 1967

Dr. MARDANI, M.Eng

Wakil Ketua BKSAP DPR RI



Fraksi PKS DPR RI Sambut Kunjungan Ketua Dewan Imam Nasional Australia

Insya Allah PKS siap bekerjasama dengan dewan ulama dan masyarakat muslim dunia khususnya Dewan Imam Nasional Australia untuk menghadirkan wajah Islam yang kontributif bagi peradaban dunia yang penuh kedamaian dan kemajuan

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (13/11) - Fraksi PKS DPR RI mendapat kunjungan silaturahmi dari Ketua Dewan Imam Nasional Australia (Australia National Imam Council -ANIC) Syekh Syadzy Al Sulaeman dan Sekjennya Syekh Mustafa yang disambut langsung oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini didampingi Bendahara Fraksi Habib Aboe Bakar Alhabsyi serta Anggota Fraksi Iskan Qolba Lubis, Buchori Yusuf, dan Dimiyati Natakusumah.

Dalam kunjungannya, Syekh Syadzy Al Sulaeman menyampaikan salam dari dewan imam dan masyarakat muslim Australia untuk Fraksi PKS dan saudara-saudara

muslim di Indonesia dan keinginan bekerjasama lebih erat dan dekat utamanya bagaimana menghadirkan Islam yang rahmat bagi dunia yang bisa ditampilkan oleh umat Islam Indonesia maupun Australia.

Ketua Dewan Imam Nasional Australia mengapresiasi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dan peran-perannya dalam menampilkan wajah Islam yang teduh dan moderat termasuk yang ditunjukkan oleh Fraksi PKS sebagai partai Islam di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengucapkan selamat datang

di Fraksi PKS serta menyambut dengan gembira dan suka cita silaturahmi Syekh Syadzy dan Syekh Mustafa—yang sudah ia kenal lama secara pribadi—di Indonesia.

"Ahlan wa sahlan. Kami menyambut gembira kedatangan Ketua dan Sekjen Dewan Imam Nasional Australia serta menyambut baik upaya kolektif ulama dan umat Islam untuk semakin berkontribusi bagi kemajuan dan peradaban dunia," ungkapnya.

Menurut Jazuli yang juga Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Muslim Dunia (IFIP), PKS sebagai salah satu partai Islam dan elemen umat Islam Indonesia berusaha maksimal dalam upaya menghadirkan Islam yang rahmatan lilalamin termasuk dengan menjalin kerjasama dengan dewan ulama dan masyarakat Islam di seluruh dunia melalui kunjungan resmi Fraksi ke sejumlah negara dalam rangka diplomasi internasional parlemen.

"Insya Allah PKS siap bekerjasama dengan dewan ulama dan masyarakat muslim dunia khususnya Dewan Imam Nasional Australia untuk menghadirkan wajah Islam yang



kontributif bagi peradaban dunia yang penuh kedamaian dan kemajuan," pungkas Jazuli.

Fraksi PKS sendiri telah melakukan kunjungan resmi Fraksi ke sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Afrika Selatan hingga

Australia dan selalu mengagendakan pertemuan dengan Mufti dan Dewan Ulama di negara-negara yang dikunjungi.

“Saya akan berkoordinasi dengan teman-teman anggota DPR yang lain dari Komisi IX dan Badan Legislasi agar bisa memperjuangkan bersama RUU Praktik Kefarmasian ini masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019, mudah-mudahan bisa diperjuangkan bersama,”

Drs. CHAIRUL ANWAR Apt
Anggota DPR RI Fraksi PKS

Jakarta (13/11) — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi (ISMAFARSI) seluruh Indonesia mengadakan aksi mendatangi gerbang DPR RI untuk menyampaikan aspirasi mereka, agar RUU Praktik Kefarmasian untuk masuk dalam prolegnas dan disahkan menjadi Undang-Undang (Selasa, 12/11/2019).

Dalam tututannya para mahasiswa tersebut menyatakan bahwa selama ini profesi kefarmasian belum mempunyai payung hukum yang kuat dalam bentuk undang-

Terima Aspirasi, PKS siap perjuangkan RUU Praktik Kefarmasian

undang.

Mahasiswa juga meminta anggota DPR RI menemuinya dan menyampaikan sikap terhadap RUU Praktik Kefarmasian.

Menanggapi aksi Mahasiswa, Anggota DPR RI Chairul Anwar didampingi oleh Ketua Umum PP Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Nurul Falah didaulat mahasiswa untuk memberikan orasi dan berkomitmen memperjuangkan aspirasi mahasiswa.

Dalam orasinya Chairul mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa sudah berkorban waktu dan tenaga untuk memperjuangkan nasib masyarakat Indonesia.

“Saya ucapkan terima kasih dan penghormatan kepada adek-adek mahasiswa yang rela datang mengorbankan waktu dan tenaga untuk hadir di sini. Saya sebagai anggota DPR Insya Allah akan memperjuangkan aspirasi teman-teman mahasiswa, karena saya menyadari bahwa selama ini belum ada payung hukum yang kuat profesi kefarmasian dalam menjalankan profesinya,” ungkap anggota DPR yang juga bergelar Apoteker ini.

Chairul juga menyatakan dalam RUU Praktik Kefarmasian nanti akan diatur beberapa hal diantaranya bagaimana perlindungan dan peningkatan profesionalitas tenaga kefarmasian.

“Dalam RUU ini nanti akan diatur bagaimana perlindungan dan peningkatan profesionalitas tenaga kefarmasian. Karena profesi farmasi sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Jika RUU ini di sahkan tentunya diharapkan masyarakat akan mendapatkan manfaat yang besar,” jelas politisi PKS asal Riau ini.

Lebih lanjut Chairul menjelaskan akan berkoordinasi dengan anggota DPR RI yang lain agar supaya RUU Praktik Kefarmasian masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020.

“Saya akan berkoordinasi dengan teman-teman anggota DPR yang lain dari Komisi IX dan Badan Legislasi agar bisa memperjuangkan bersama RUU Praktik Kefarmasian ini masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019, mudah-mudahan bisa diperjuangkan bersama,” ungkap Chairul mengakhiri keterangannya di depan gerbang Komplek Parlemen.



HARI ASPIRASI



Aspirasi dari DPP Prokami

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si dan dr. H. Adang Sudrajat, MM,Av. menerima Pengurus Perhimpunan Tenaga Profesi Kesehatan Muslim Indonesia (PROKAMI) di ruang Aspirasi Fraksi PKS DPR RI pada Selasa 12 November 2019. Agenda dalam rangka sharing dakwah di profesi kesehatan serta memberikan masukan terkait perbaikan sistem dan regulasi kesehatan di Indonesia



Kunjungan dari SDIT Ibadurrahman Tasikmalaya

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar, Kota Tasikmalaya KH Toriq Hidayat, Lc menerima kunjungan dari SDIT Ibadurrahman, Tasikmalaya pada Selasa 12 November 2019 di Kompleks DPR RI Senayan. Kunjungan ini dalam rangka pengenalan peran dan fungsi DPR serta peranan Fraksi PKS DPR RI dalam dakwah parlemen.

Rafli Soroti Keberadaan dan Fungsi Strategi BPMA bagi Pembangunan Aceh

Jakarta (16/11) — Keberadaan Badan Pengelolan Migas Aceh (BPMA) mendapat sorotan dari Anggota Dewan dari Fraksi

Anggota Dewan dari Fraksi PKS, yang juga seorang budayawan Aceh ini menilai bahwa peran BPMA sangat strategis bagi pembangunan Aceh, dan karenanya badan baru ini harus segera diperkuat dan didukung penuh untuk menjalankan fungsinya.

Salah satu penguatan yang harus disegerakan adalah kepastian akan personal yang ditunjuk untuk memimpin Badan ini. "Kepala BPMA perlu segera di defenitiskan" ujar Rafli.

Rafli berharap Plt. Gubernur Aceh bergerak cepat mengisi posisi kepala BPMA yang saat ini masih ad interim.

"Fungsi BPMA untuk menjaga dan mengelola kekayaan migas Aceh perlu diisi figur yang punya kapasitas mumpuni, amanah, dan punya loyalitas yang tinggi terhadap kepentingan rakyat Aceh", ujarnya.

Selain itu lanjut Rafli BPMA juga harus mampu bekerja sesuai ritme yang diharapkan Pemerintah Aceh, Untuk itu saya siap mendukung

100 persen kepentingan Aceh. Sebagai Legislatif saya akan mengawal ketat hal ini.

"Kepala BPMA yang defenitif jangan sampai diisi oleh orang yang berkarakter asal bapak senang (abs) atau main dua kaki, apalagi yang berpotensi punya konflik of interest. Karena yang demikian kita khawatirkan bukan berjuang untuk rakyat Aceh dan tidak bisa menjadi regulator yang handal," paparnya penuh semangat.

Selain itu Rafli juga memberi pandangannya terkait rencana pengambil alihan pengelolaan Blok Migas Aceh oleh Pemerintah Aceh.

"Saya kira dalam hal ini semua kita harus memiliki pandangan jernih. Jika Pemerintah Aceh memiliki keinginan untuk mengambil alih block migas milik Aceh, ya boleh dong. Asal bisa profesional, dijalankan dengan benar, dan bisa lebih baik. Tentu harus ada transfer knowledge yang melibatkan para expert. Butuh waktu. Tapi kita memang harus mulai mengelola kekayaan sendiri dan itu harus dimulai sekarang, kalau tidak kapan lagi ?,

"sambungnyanya.

Rafli masih melanjutkan tanggapannya dengan menghimbau semua kalangan untuk berfikir positif terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah Aceh.

"Tetap positif thinking sambil sama-sama kita kawal. Kerisauan kita adalah melihat banyak perdebatan tanpa cukup memahami substansi masalah yang diperdebatkan. Apalagi menyangkut masalah block NSB PHE yang sangat strategis bagi Aceh," urai Rafli.

Rafli mengajak untuk sama-sama memperjuangkan hak rakyat Aceh. Milik Aceh seoptimal mungkin dimanfaatkan untuk Aceh, inilah inti MoU Helsinki dimana Aceh dalam bingkai NKRI dengan segala kekhususannya, telah melahirkan BPMA.

la kembali mengingatkan, "harkat martabat Pemerintah Pusat adalah kesejahteraan

Fungsi BPMA untuk menjaga dan mengelola kekayaan migas Aceh perlu diisi figur yang punya kapasitas mumpuni, amanah, dan punya loyalitas yang tinggi terhadap kepentingan rakyat Aceh

RAFLI

Anggota DPR RI
Daerah Pemilihan
Aceh II

dan
kebahagian
an daerah
Aceh itu
sendiri,"
tutup
Rafli.

Foto
dpr.go.id





FRAKSI PKS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Terima kasih **Pahlawan** HARI PAHLAWAN - 10 NOVEMBER

*"Hakikat kepahlawanan
adalah **kontribusi dan dedikasi.***

***Karya nyata** lebih esensi
daripada **gelar pahlawan**
itu sendiri"*

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER

Ketua Fraksi PKS DPR : Jaga Spirit Persatuan dan Peduli Rakyat

Terima Kasih
Pahlawan
HARI PAHLAWAN - 10 NOVEMBER

Jakarta (10/11) - Hari Pahlawan harus menumbuhkan semangat komponen bangsa untuk selalu menjaga persatuan dan kepedulian kepada rakyat. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Jakarta, Minggu (10/11).

Pertama, kepahlawanan adalah tentang persatuan.*

"Indonesia merdeka karena persatuan. Tidak ada cara lain. Sebaliknya penjajah pasti kerjanya memecah belah dan melemahkan persatuan. Eksperimentasi itulah yang dipraktikkan para penjajah hingga mampu bertahan puluhan bahkan ratusan tahun di Indonesia," ungkap Jazuli.

Untuk itu setiap komponen bangsa (siapaapun mereka) jika cinta dengan kemerdekaan, cinta kepada pahlawan, jaga betul persatuan. Jangan

mengelurakan pernyataan, sikap, dan perbuatan yang membuat ikatan persatuan kita koyak.

"Jangan asal bicara yang membuat rakyat tidak nyaman, saling curiga, merasa didiskriminasi dan diperlakukan tidak adil. Ini benih-benih yang merusak persatuan bahkan bisa menjadi sumber konflik vertikal maupun horisontal," ungkap Jazuli.

Kedua, kepahlawanan adalah tentang kepedulian kepada rakyat.

"Tujuan utama negara Indonesia merdeka adalah mensejahterakan rakyat. Begitu amanat pembukaan UUD 1945. Maka, menjadi pahlawan di era sekarang adalah dengan menunjukkan kepedulian dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat," ungkap Jazuli.

Menurutnya, masyarakat yang peduli, gemar membantu, menjadi relawan kemanusiaan,

Tugas kita sekarang untuk menjaga persatuan dan semaksimal mungkin merawat kepedulian kepada rakyat. Inilah cara kita menghormati para pahlawan

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

umbuhkan semangat gotong royong mereka adalah pahlawan. Pemerintahan dan DPR yang menghadirkan kebijakan pro rakyat, meringankan beban ekonomi rakyat, menjamin akses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan juga layak disematkan mewarisi spirit kepahlawanan.

Kita semua mesti introspeksi apakah selama ini kita benar-benar menghormati para pahlawan dan mewarisi spirit kepahlawanan mereka. "Tugas kita sekarang untuk menjaga persatuan dan semaksimal mungkin merawat kepedulian kepada rakyat. Inilah cara kita menghormati

para pahlawan," pungkas Jazuli.

Terakhir, atas nama pimpinan dan anggota Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengucapkan "Selamat hari pahlawan!". Salam hormat untuk seluruh keluarga para pahlawan, seraya berdoa semoga Allah menerima



HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER

Pahlawan Hari Ini adalah yang Mampu Mengentaskan Kemiskinan

Terima Kasih
Pahlawan
HARI PAHLAWAN - 10 NOVEMBER

Jakarta (10/11) — Hari pahlawan tahun ini oleh anggota DPR RI Nevi Zuarina, dijadikan moment untuk mengajak semua pihak terutama pemerintah untuk bertekad mengurangi angka kemiskinan di Indonesia hingga dibawah 10 juta orang. Hingga maret 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin Indonesia pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta penduduk.

Nevi mengatakan, pengkategorian penduduk miskin di Indonesia masih di bawah standard dunia. BPS membuat standard untuk tahun ini bahwa garis kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250,- /kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp313.232,- (73,66 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan

sebesar Rp112.018,- (26,34 persen). Ini artinya tiap hari orang miskin Indonesia berpendapatan Rp. 14.175,- atau sekitar US\$ 1,00.

Standard kemiskinan dunia itu 2 dolar Amerika. Sedangkan di kita hanya 1 dolar Amerika. Jika kita mengikuti standard duna, maka akan terjadi lonjakan yang sangat drastis di negara kita", ucap Nevi.

Politisi PKS ini sangat berharap kepada pemerintah, untuk bersama-sama di hari pahlawan ini, menyatakan sikap, untuk bersungguh-sungguh mengurangi angka kemiskinan negara kita. Semua ini akan mampu tercapai manakala setiap pribadi atau golongan di lingkungan kekuasaan mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan untuk mengutamakan kepentingan bangsa.

Legislator Sumatera Barat II ini menjelaskan, bahwa bangsa kita memiliki sumber

"Saya berharap, negara kita, terutama dari unsur pemerintah, muncul sosok pahlawan yang sesungguhnya dimana dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia

HJ. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI

daya alam yang secara logika akan mampu memberikan kesejahteraan secara merata. Selain terjadi ketidak seimbangan kesejahteraan di wilayah-wilayah negara kita, juga terjadi kerentanan yang sangat rapuh terhadap daya beli masyarakat kita. Terjadi sedikit saja gejala harga pada makanan pokok dan energi seperti BBM atau TDL, maka akan terjadi kegaduhan luar biasa di masyarakat yang kadang di dengar kadang diabaikan oleh pemerintah.

Peta sebaran kemiskinan di wilayah Indonesia berdasar data BPS, tambah Nevi, tiga

provinsi di Pulau Jawa memiliki penduduk miskin yang lebih banyak dibanding provinsi lainnya. Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin 4,11 juta jiwa, Jawa Tengah 3,74 juta jiwa, dan Jawa Barat 3,4 juta jiwa.

Total penduduk miskin di Pulau Jawa menca-pai 12,74 juta jiwa atau separuh total penduduk miskin di tanah air. Namun, secara persentase jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa lebih ren-

dah dibanding provinsi-provinsi di Indonesia timur yang memiliki angka penduduk miskin di atas 20% seperti Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"Saya berharap, negara kita, terutama dari unsur pemerintah, muncul sosok pahlawan yang sesungguhnya dimana dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pahlawan itu yang mampu memberikan kebahagiaan esensi dalam kehidupan yang sudah merdeka selama 74 tahun. Esensi kebahagiaan itu adalah hidup layak dengan pendidikan yang baik, kesehatan yang layak dan daya beli yang cukup untuk hidup dan menghidupi keluarganya", tutup Nevi Zuarina.

Foto : dpr.go.id





الذین إذا أصابتهم مصيبة قالوا

إنا لله وإنا إليه راجعون

Atas nama keluarga besar Fraksi PKS
DPR RI Turut berduka atas berpulangnya
ke rahmatullah Menteri Perumahan Rakyat
Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I

Bapak Yusuf Ashari

Wafat pada Kamis Siang
14 November 2019

Semoga Allah SWT menerima
seluruh amal ibadahnya.
serta diampuni segala
dosanya, Amin



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



PROFIL**Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si.,M.Psi.T**

Lahir di Jakarta, 30 April 1969 tidak membuat Ledia kehilangan akar leluhurnya. Tanah parahyangan dan pasundan tercatat menjadi daerah pemilihan (dapil) selama tiga periode dan berhasil menghantarkan Anggota Komisi

X DPR RI ini secara berturut-turut. Bukan tanpa sebab, karena selama ini rajin silaturahmi dan "ngaparak" ke konstituen.

Istri dari Drs. H. Bachtiar Sunasto ini terkenal murah senyum dan ramah, ditambah

latar belakang pendidikan semakin menegaskan itu. Lulusan sarjana Kimia dan Magister Psikologi terapan dari Universitas Indonesia ini punya chemistry yang mudah akrab dan mampu memahami persoalan dengan cepat.

Ibu empat putra ini, meski menulis menggunakan tangan kiri (kidal), namun hebatnya jika makan dengan tangan kanan. Setidaknya berhasil mendobrak persepsi publik, bahwa apa yang baik sulit apun harus diperjuangkan. Jika ada niat, pasti disana ada jalan.

Keluarga bagi Ledia adalah niat awal dari semua aktivitas, karenanya dalam kesibukan yang luar biasa di Parlemen dan sebagai Ketua Humas DPP PKS tidak menyurutkan kehangatan bersama keluarga. Quality time dan me-time berjalan beriringan.

Facebook:
Ledia Hanifa Amaliah

Twitter:
@lediahanifa

Instagram:
@ledia_hanifa

Website:
lediahanifa.com



Keluarga

Sarana Implementasi Nilai Kebajikan



”
 Keluarga adalah tempat belajar mengimplementasi nilai ruhiyah dan kebajikan. Keluarga yang komunikatif dan aman akan menjadi tempat belajar yang nyaman. Belajar mengembangkan potensi diri untuk berkontribusi bagi negeri





Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

**KANAL RESMI
FRAKSI PKS
DPR RI**

fraksi.pks.id



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI